

# DINAMIKA KELOMPOK KEPENTINGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2008



**SKRIPSI**

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Politik*

**OLEH :**

**MOHAMMAD REZA**

**E111 02 058**

No. 1	
No. 2	
No. 3	
No. 4	
No. 5	
No. 6	
No. 7	
No. 8	
No. 9	
No. 10	
No. 11	
No. 12	
No. 13	
No. 14	
No. 15	
No. 16	
No. 17	
No. 18	
No. 19	
No. 20	
No. 21	
No. 22	
No. 23	
No. 24	
No. 25	
No. 26	
No. 27	
No. 28	
No. 29	
No. 30	
No. 31	
No. 32	
No. 33	
No. 34	
No. 35	
No. 36	
No. 37	
No. 38	
No. 39	
No. 40	
No. 41	
No. 42	
No. 43	
No. 44	
No. 45	
No. 46	
No. 47	
No. 48	
No. 49	
No. 50	
No. 51	
No. 52	
No. 53	
No. 54	
No. 55	
No. 56	
No. 57	
No. 58	
No. 59	
No. 60	
No. 61	
No. 62	
No. 63	
No. 64	
No. 65	
No. 66	
No. 67	
No. 68	
No. 69	
No. 70	
No. 71	
No. 72	
No. 73	
No. 74	
No. 75	
No. 76	
No. 77	
No. 78	
No. 79	
No. 80	
No. 81	
No. 82	
No. 83	
No. 84	
No. 85	
No. 86	
No. 87	
No. 88	
No. 89	
No. 90	
No. 91	
No. 92	
No. 93	
No. 94	
No. 95	
No. 96	
No. 97	
No. 98	
No. 99	
No. 100	

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2009**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dinamika Kelompok Kepentingan Pada Pemilihan  
Walikota Makassar 2008

Nama : Mohammad Reza

Nim : E 111 02 058

Program Studi : Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Makassar, 22 Juni 2009


Menyetujui,

Konsultan I



Dr. Armin Arsyad, M.Si  
NIP. 130 786 086

Konsultan II



Drs. Muhammad Saad, MA  
NIP. 131 453 871

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Armin Arsyad, M.Si  
NIP. 130 786 086

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si  
NIP. 132 205 466

## HALAMAN PENERIMAAN

Judul Skripsi : DINAMIKA KELOMPOK KEPENTINGAN  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
MAKASSAR 2008

Nama Mahasiswa : MOHAMMAD REZA

Nomor Pokok : E111 02 058

Jurusan : POLITIK PEMERINTAHAN

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Politik Pemerintahan.

Makassar, Senin, 1 Juni 2009.

Tim Evaluasi

Ketua : Dr. Armin Arsyad, M.Si

Sekretaris : Sukri, S.IP., M.Si

Anggota : 1. Drs. Muhammad Saad, MA

2. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

3. A. Naharuddin, S.IP., M.Si

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dinamika Kelompok dan Teori Kelompok.....	11
B. Jenis-Jenis Kelompok Kepentingan.....	20
C. Arti Kelompok Kepentingan dan Fungsinya.....	23
D. Teori Pertukaran dan Teori Ketergantungan .....	32
E. Konsep Pilkada Langsung .....	37
F. Kerangka Pemikiran .....	41
G. Definisi Operasional .....	43
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Dan Dasar Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Jenis Data .....	47
E. Analisis Data .....	47

#### BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Kota Makassar .....	49
B. Kondisi Geografis Kota Makassar .....	53
C. Kondisi Sosial Ekonomi Kota Makassar .....	54
D. Kondisi Politik dan Pemerintahan .....	60
E. Kondisi Pelaksanaan Pemilihan Walikota di Kota Makassar .....	63

#### BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kelompok Kepentingan Dalam Pilkada Walikota Makassar .....	70
B. Upaya Kelompok Kepentingan Dalam Mengusung Calon Perseorangan Pada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar .....	81

#### BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92

#### DAFTAR PUSTAKA

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Serta tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan salawat kepada Junjungan umat manusia Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa pelita ilmu kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril semua dapat teratasi. Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda** Drs. Alwi Beddu dan **Ibunda** (Alm) Herlinda Bagman yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dan tak lupa juga **Adinda** Muhammad Chairil Wahyudi. Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. Deddy Tiksanawadi Tikson, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP-UH.
3. Ketua Program Studi Ilmu Politik Ibu Dr. Gustiana A. Kambo.
4. Bapak Dr. Armin Arsyad selaku Pembimbing I serta Bapak Drs. Muhammad Saad selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen pengajar dan Staf pegawai dilingkungan FISIP UNHAS yang pernah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.
6. Seluruh keluarga besar (Alm) H. Beddu Bengge dan (Alm) J.K. Bagman.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bapak (Alm) Nurdin Halik di Makassar, Bapak (Alm) H. Paléwai Azis di Jeneponto serta Bapak Faisal di Maros.
8. Kepada Sahabat yang tak terlupakan Reski Yanti Nurdin, S.IP, Lukman Palewai, S.IP, Farida, S.IP, Nuryadi Kadir, S.Sos, Amiruddin, Arfin dan Darmawaty.
9. Teman-teman J E M P O L 02 (Jaringan Eksekutif Mahasiswa Politik 02) "*Solidarity For Struggle*" ada; Rina, eQ, Ida bukan Aco, Atie, Fio mace, Arra, Yunita, Narti, Sry "maaf", Rosi, Risna, Asry, Sasty & Elsa kalian semua adalah bunga nya POL'02 ☺ Tak lupa juga para ksatria POL'02 Ancha presidenka, Ichul & Rusdin teman ujian mejaku, Illank teman seminar proposalku, Amir Majnun teman urus2 berkas penyelesaian studiku, Dg. Ammang (makasih buat jepretan dan editan foto buat ijazahku bro) , Apping, Lu'mang, Baso, Baim, Firman, Hendriks, YxR, Umar, Dandy, Ippang ustad, Guntur, Syukur, Ichal "asDos",

Sarby, Husman, Darday, Ferdy, Kamrin, Lorent, Ovel serta (Alm) Sastra. Kalo ada namamu yg lupa kumasukkan ccess tulis disini mi saja:.....

10. Teman-teman di CHAOS'02, BEM FISIP UH (*Bersama..., Bersatu..., Berjaya..*), HIMAPOL, ISEE dan DIPA' DAENG.
11. Teman-teman Posko KKN REGULER GEL.70 2006 Desa Madello, Kec. Balusu, Kab. Barru.
12. Yang penuh pengertian tapi sedikit pemaksa, Onya Abd. Hatala (makasi tlah mewarnai hari-hariku).
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang patut mendapatkan ucapan terima kasih.

Demikianlah kata pengantar ini penulis paparkan, seluruhnya penulis serahkan kepada Allah SWT, untaian doa keselamatan dan kesejahteraan atas mereka yang telah memberikan bantuan kepada penulis, karena penulis hanyalah insan yang penuh dengan keterbatasan yang hanya mampu mengucap "Terima kasih"

Makassar, 22 Juni 2009

PENULIS



## ABSTRAK

**MUHAMMAD REZA, E111 02 058, Dengan Judul : Dinamika Kelompok Kepentingan Pada Pemilihan Walikota Makassar 2008. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Armin Arsyad sebagai konsultan I dan Bapak Drs. Muhammad Saad, MA sebagai konsultan II.**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa pada dalam penyelenggaraan pemilihan walikota di Makassar yang telah berlangsung terdapat beberapa peran dari kelompok-kelompok kepentingan dalam mengusung dan mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Kelompok-kelompok kepentingan ini, umumnya dari organisasi yang masih menjadi bagian dari partai-partai politik.

Penelitian ini berusaha mengkaji permasalahan tentang bagaimana dinamika kelompok kepentingan dalam mempengaruhi partai politik untuk mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Ion perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok kepentingan dalam mempengaruhi partai politik untuk mengusung pasangan calon dan upaya kelompok kepentingan dalam mengusung calon perseorangan.

Dengan landasan teori yang digunakan, bahwa dinamika kelompok kepentingan yang dimaksud adalah saling memberikan pengaruh antara kelompok sosial dan kepentingan yang terorganisasi dan ideologi yang pada umumnya berlangsung melalui partai dan lembaga politik untuk membentuk kebijakan umum yang saling menguntungkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus dengan tipe penelitian adalah tipe deskriptif analisis. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan informan kunci dan studi pustaka. Adapun teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif.

Dari tujuh pasangan calon walikota dan wakil walikota, hanya 4 pasangan calon yang didukung oleh partai politik sedangkan 3 pasangan lainnya adalah calon dari perseorangan (independen). Pasangan IASmo didukung oleh Partai Golkar, PDIP, PBR, PDS dan PBB. Pasangan Idial didukung oleh Partai Demokrat dan PDK. Pasangan HAJAR didukung oleh PKS, Partai Merdeka, PNI-Marhaenisme, PSI dan PNBK. Pasangan RI didukung oleh PPP dan PAN Sedangkan dari calon perseorangan hanya mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan dari masyarakat yaitu pasangan PASmi, BerIKRAR dan IDOLA.

Peran kelompok kepentingan dari pada pemilihan walikota Makassar, pasangan IASmo khususnya dari Partai Golkar yaitu AMPI, AMPG dan Kosgoro, mengingat Ilham Arief Sirajuddin adalah kader dari partai Golkar sendiri. Selain kader, ia juga pernah menjadi ketua dari AMPG, dengan begitu para anggota kelompok-kelompok kepentingan tersebut meyakinkan ke Golkar untuk mendukung sepenuhnya IASmo. Adapun dari PDS dengan kelompok kepentingan yang mengajukan dukungan ke IASMO adalah Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI). Ketua PGPI menyerukan ke seluruh jamaahnya sebagai umat nasrani untuk mendukung pasangan IASmo memimpin kembali Makassar untuk periode lima tahun ke depan. PGPI sebagai bagian dari PDS mengusulkan secara administratif dan memilih pasangan IASmo.

Karena dianggap pemimpin yang tidak pernah berpihak atas satu agama tertentu dan bisa mengayomi masyarakat majemuk yang ada di Makassar.

Sedangkan dari PDIP yang mendukung pasangan IASmo karena melihat hanya pasangan ini yang satu visi dengannya yaitu memperjuangkan hak hidup untuk *wong cilik* dengan platform bebas dari lahir sampai mati. Dukungan PDIP langsung datang dari Mawang Palaguna sendiri, kelompok kepentingan dari PDIP sendiri adalah Gerilyawan Banteng yang mengajukan dukungan ke PDIP agar mendukung pasangan IASMo. Dari PBB dan PBR sebagai partai yang berlandaskan atas agama Islam yang juga merapat ke IASmo, karena alasan pasangan ini telah teruji dan berpengalaman.

Dari calon perseorangan pada pasangan calon PASmi, mendapat dukungan dari beberapa kelompok kepentingan seperti : Rakyat Miskin Kota, LMD, Serenai, Kelompok Perempuan, 16 FM hingga organisasi gereja. Dukungan secara administrasi berupa pengumpulan KTP, kemudian secara moral juga mendukung pasangan PASmi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota. Dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut menjadi relawan yang berhasil mensosialisasikan pasangan PASmi lewat kampanye dialogis dan iklan, seperti baliho, stiker dan spanduk. Hal ini dibuktikan pada saat hasil perhitungan suara, hanya pasangan PASmi yang memiliki suara tertinggi dari pasangan calon yang diusung secara independen.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sistem politik, kelompok kepentingan sebagai infrastruktur politik mempunyai kekuatan politik yang punya warna dalam panggung politik. Ruang gerak kelompok kepentingan sebagai salah satu kekuatan politik sangat ditentukan oleh sistem politik itu sendiri khususnya sistem kepartaian yang diterapkan suatu negara.

Kelompok kepentingan punya kedudukan tersendiri dalam sistem politik bahkan kelompok kepentingan sangat mempengaruhi proses *input* dan *output* dalam sistem politik. Hal ini dijelaskan oleh Easton dan Almond dalam teori sistemnya (Muchtar Mas' oed, 1995:30). Bahkan ada beberapa negara di dunia dimana kelompok kepentingan ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah di negara tersebut.

Kelompok kepentingan sebagai kelompok yang terbentuk dimana orang-orang yang berada di dalamnya memiliki kesamaan visi dan misi. Akan senantiasa berusaha untuk turut serta mengambil peranan dalam sebuah proses politik. Keberadaan kelompok-kelompok kepentingan tersebut tampil dengan perilaku-perilaku yang riil, yang dapat memperoleh perhatian dari masyarakat dan elit-elit lainnya.

Kelompok-kelompok kepentingan akan senantiasa mencari momentum yang tepat, kapan, dimana dan bagaimana memposisikan dirinya dalam suatu sistem politik. Terkait dengan keberadaan kelompok kepentingan dalam sistem politik maka mari melihat menyikapi dan mengkaji keberadaan kelompok kepentingan dalam proses politik lokal yang telah dilaksanakan di kota Makassar yaitu pemilihan calon walikota dan wakil walikota atau pemilihan kepala daerah secara langsung.

Penyelenggaraan pilkada telah usai, dengan kemenangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur berdasarkan versi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan meraih jumlah suara 65,49 persen dari jumlah suara pemilih. Hasil yang dicapai mencerminkan demokratisasi yang terjadi di kota Makassar. Dapat dinyatakan bahwa kemenangan apa yang dicapai dalam pilkada kali ini adalah kemenangan *demokrasi*, sedangkan kemenangan itu adalah *rakyat* yang memilih. Rakyatlah yang telah memilih pasangan pemimpin Kota Makassar sebagai pemimpinnya secara demokratis, terlepas dari kualitas pilkada secara keseluruhan yang sudah berlangsung.

Pra pilkada, kelompok-kelompok kepentingan ikut serta dalam pesta demokrasi ini. Mereka ingin mengawal bagaimana, pemilihan walikota dan wakil walikota ini, bisa berjalan aman dan lancar. Ikut terlibatnya kelompok-kelompok kepentingan ini bisa dikatakan sebagai tim sukses ataupun relawan guna mengusung kandidat pilihannya.

Kelompok-kelompok kepentingan baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir pada awalnya memberi dukungan kepada pasangan calon. Dengan alasan pasangan calon telah aspiratif akan tujuan organisasi, sehingga para elit pun secara persuasif mengajak semua anggotanya untuk mendukung juga. Walaupun begitu, tetapi secara intrinsik organisasi tersebut menginginkan bargaining apabila pasangan calon tersebut terpilih. Jadi dukungan yang diberikan oleh kelompok-kelompok kepentingan adalah sebagai balas jasa dari pasangan calon walikota.

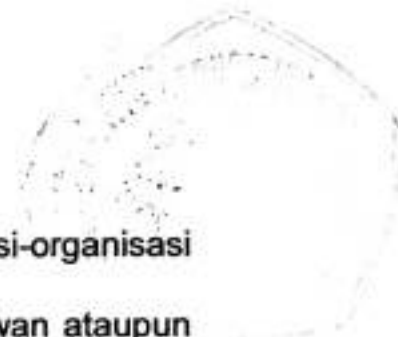
Berdasarkan dari pemaparan di atas, dalam kesempatan ini saya selaku penulis akan mencoba mengkaji terhadap kelompok-kelompok kepentingan di Kota Makassar dalam menyikapi proses politik lokal pada pemilihan kepala daerah calon walikota dan wakil walikota di Makassar. Dalam proses penentuan pasangan calon walikota di kota Makassar pada khususnya dan di kota lain pada umumnya, kelompok kepentingan pada umumnya menjadi perhatian tersendiri oleh elit-elit yang akan bertarung untuk mendapat dukungan dalam rangka pencapaian kekuasaan, kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah posisi sebagai eksekutif di tingkat Kota. Dalam hal mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan setiap calon Walikota di kota Makassar memiliki strategi politik tersendiri, termasuk menjalin kesepakatan-kesepakatan dengan kelompok-kelompok kepentingan atau dalam ilmu politik dikenal dengan istilah kontrak politik.



Kelompok-kelompok kepentingan yang sangat berpengaruh dalam proses penentuan calon walikota di Kota Makassar adalah kelompok-kelompok kepentingan yang masih bagian dari partai itu sendiri. Contohnya anak cabang dari partai politik yang mengusung pasangan calon Idris Manggabarani- Adil Patu seperti mereka yang tergabung dalam Pemuda PDK. Informasi yang saya peroleh bahwa di Kota Makassar organisasi ini mempunyai basis massa mayoritas dari kalangan pemuda yang berdomisili di Makassar terbilang kuat sehingga tidak mengherankan kalau kelompok kepentingan ini menjadi incaran setiap calon dalam rangka memperoleh dukungannya.

Kelompok kepentingan kedua yang tidak kalah pengaruhnya dengan kelompok-kelompok kepentingan di atas adalah kelompok kepentingan yang masih bagian dari Partai Golkar yaitu mereka yang tergabung dalam Angkatan Muda Partai Golkar. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, organisasi ini mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai Golkar.

Kemudian ada juga kelompok kepentingan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang umumnya adalah para mahasiswa-mahasiswi atau kalangan pemuda muslim. Secara penuh para anggota KAMMI akan mendukung kepada pasangan calon yang diusung oleh PKS.



Kelompok-kelompok kepentingan lainnya adalah organisasi-organisasi yang berlatar belakang ekonomi dan kelompok anak purnawirawan ataupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpin atau anggota oleh salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota. Kelompok-kelompok itu berupa Persatuan Hiburan dan Restoran Indonesia (PHRI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Sulawesi Selatan (APMISO), Forum Kerukunan Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), dan sebagainya.

Adapun calon wakil walikota Makassar juga didukung dari kelompok kepentingan yang berlatar belakang etnis, yaitu Kerukunan Keluarga Turatea. Yang mengusung nama Supomo Guntur untuk dipasangkan dengan Ilham Arief Sirajuddin (incumbent). Dengan alasan beliau dianggap berpengalaman dalam pemerintahan juga keterwakilan untuk etnis Makassar.

Jauh sebelum masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, kelompok-kelompok kepentingan yang tersebut di atas telah melakukan bargaining politik atau kesepakatan dengan calon-calon yang sifatnya mutualisme yaitu kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungannya untuk mencapai kepentingannya dan calon mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan pula. Dalam penentuan siapa yang akan didukungnya pun membutuhkan proses yang lama terhadap anggota-anggotanya karena perlu perspektif yang sama. Agar calon yang

diusungnya tidak kalah dan akhirnya tidak memermalukan lembaga atau organisasinya.

Kalau pemilihan kepala daerah sebelumnya didasarkan pada pilihan politik para legislator di tingkat kabupaten masing-masing, maka untuk pemilihan kepala daerah 2008 ini, ditentukan oleh pilihan politik masyarakat yang ada dalam wilayah kota dimana pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Dengan demikian setiap calon haruslah lebih banyak melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat pemilih baik pemilih pasif maupun pemilih aktif seperti kepada mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu.

Pemilihan pemimpin secara langsung pertama kali dilaksanakan oleh negara kota yaitu Yunani kuno, kemudian diperkenalkan kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Sistem pemilihan secara langsung dikenal juga dengan sebutan *direct democracy*. Mengingat pemilihan kepala daerah menggunakan sistem langsung, maka setiap calon pun sebaiknya bersentuhan langsung dengan masyarakat karena bukan tidak mungkin calon-calon yang muncul hanya dikenal oleh masyarakat dari segi calon nama calon saja.

Dengan demikian setiap calon Walikota akan senantiasa melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang berada di tengah-tengah masyarakat pemilih, dan hal ini tidak hanya berlaku pada pelaku-pelaku



politik di Kota Makassar tetapi juga berlaku di Kota-kota lainnya yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena sangat terbatas bagi calon untuk melakukan pendekatan secara individual terhadap masyarakat pemilih, sehingga setiap calon Walikota pun harus memperluas jaringan melalui perpanjangan tangan mereka yaitu mereka yang bisa mempengaruhi pilihan politik masyarakat pemilih.

Melihat kondisi sistem politik itu, kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Kota Makassar sadar kalau mereka punya nilai lebih di mata elit-elit politik tingkat lokal yang bersaing untuk mendapatkan dukungan. Seorang calon Walikota tidak akan berhasil sebagai calon terpilih ketika dia tidak lihai dalam menjual isu-isu politiknya dan dalam merekrut tim sukses atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Sebaliknya pula para kelompok-kelompok kepentingan yang terkadang juga merangkap sebagai tim sukses harus memikirkan secara cerdas tentang hal-hal yang mesti dilakukan agar supaya pasangan calon yang diusungnya bisa menang. Tidak hanya dengan mengajak semua anggotanya bisa dalam visi yang sama dalam memilih. Tetapi juga bagaimana agar masyarakat secara umum juga dalam kesatuan yang sama dalam memilih pasangan calon walikota dan wakilnya yang diusung.

Perlu diingat, kelompok-kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok kepentingan punya basis massa tersendiri. Jadi ketika seorang

calon berhasil memperoleh dukungan dari atas nama suatu kelompok kepentingan, maka peluang untuk memperoleh pilihan politik dari basis massa kelompok kepentingan tersebut sangat memungkinkan, kondisi kancah politik seperti tidak hanya kita temukan di Kota Makassar tetapi di daerah lain juga akan kita temukan lika-liku politik seperti ini.

Secara aktual empirik dalam dunia politik seakan mengatakan bahwa tidak ada teman ataupun musuh yang abadi tetapi yang abadi adalah sebuah kepentingan, dimana para pelaku politik dibawah oleh kepentingan itu untuk menjalin suatu interaksi yang sifatnya mutualisme. Untuk mencapai kepentingan itu tidak jarang terjadi penyimpangan konstitusi yang mengatur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan sebuah judul sebagai berikut:

## **DINAMIKA KELOMPOK KEPENTINGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2008.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan berkandidat kepada perilaku-perilaku politik baik perilaku elit politik lokal, perilaku politik kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun perilaku politik masyarakat setempat sebagai penentu atau pemilih utama dalam penentuan calon walikota, maka penulis ingin menyorot dan mengkaji masalah-masalah politik tersebut, dimana lingkup pengkajian dibatasi oleh

judul skripsi tersebut diatas. Permasalahan-permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinamika kelompok kepentingan dalam mempengaruhi partai politik untuk mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar.
- b. Bagaimana upaya kelompok kepentingan dalam mengusung calon perseorangan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk menganalisis peran kelompok kepentingan dalam mempengaruhi partai politik untuk mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar.
- b. Untuk mengetahui upaya kelompok kepentingan dalam mengusung calon perseorangan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Secara akademik, sebagai bahan referensi ilmiah bagi para akademisi, mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik

yang sama khususnya dinamika kelompok kepentingan pada pemilihan kepala daerah langsung .



- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi tentang dinamika kelompok-kelompok kepentingan dalam penentuan calon walikota di Kota Makassar pada khususnya kiranya dapat dijadikan acuan dalam menyikapi kedudukan kelompok kepentingan dalam suatu sistem politik khususnya dalam proses politik lokal. Dengan adanya informasi dari hasil penelitian ini, kiranya masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Makassar, memiliki kedewasaan berpolitik dalam menyikapi proses politik dalam kaitannya dengan kelompok kepentingan sebagai suatu organisasi mempunyai kekuatan politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan 7 (tujuh) hal yang dianggap bisa membantu penelitian ini, diantaranya adalah: Dinamika Kelompok dan Teori kelompok, Jenis-jenis Kelompok kepentingan, Arti Kelompok kepentingan dan Fungsinya, Teori Pertukaran dan Teori Ketergantungan Konsep Pilkada Langsung, Kerangka Pemikiran dan Defenisi Operasional. Berikut adalah uraian point-point tersebut di atas.

#### **1. Dinamika Kelompok dan Teori kelompok**

Sejarah dinamika kelompok dimulai dari zaman Yunani kemudian ke zaman liberalisme, zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa, zaman gerakan massa, zaman psikologi sosial dan akhirnya menjadi zaman dinamika kelompok. Status dinamika kelompok awalnya dari (1) Cabang Sosiologi (Homans Moreno dan Mitschell), (2) Cabang psikologi (Robert F.Bales), (3), Cabang psikologi sosial (Otto Klineberg) dan (4) Bidang eksperimen (Catwright dan Zender).

Sebelum memahami arti dinamika kelompok, maka terlebih dulu memahami arti dinamika dan kelompok. Dinamika adalah tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Kemudian dinamika juga bisa berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain. Sedangkan

kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama.

Interaksi bisa menimbulkan kerja sama apabila masing-masing anggota : mengerti akan tujuan yang dibebankan di dalam kelompok tersebut. Adanya saling menghormati di antara anggota-anggotanya, adanya saling menghargai pendapat anggota lain, adanya saling keterbukaan, toleransi dan kejujuran di antara anggota kelompok. Menurut Reitz (1977) kelompok mempunyai karakteristik : Terdiri dari dua orang atau lebih, berinteraksi satu sama lain, saling membagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Artinya kelompok tidak terlepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Arti dari Dinamika kelompok :

1. Merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama.

2. Konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang

selalu berubah-ubah.

Maka Dinamika Kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Sedangkan dinamika politik ialah saling pengaruh antara kelompok sosial, kepentingan yang terorganisasi dan ideology, yang pada umumnya berlangsung melalui partai dan lembaga politik untuk membantuk kebijakan umum (Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, 1992:286).

Pendekatan-pendekatan dari dinamika kelompok :

1. Pendekatan oleh Bales dan Homans
2. Pendekatan oleh Stogdill
3. Pendekatan dari ahli Psycho Analysis (Sigmund Freud dan Scheidlinger).
4. Pendekatan dari Yennings dan Moreno.

Dinamika kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam sebuah kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain:

1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. (Bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.)
2. Memudahkan segala pekerjaan.



(Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain)

3. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif dan efisien. (pekerjaan besar dibagi-bagi sesuai bagian kelompoknya masing-masing / sesuai keahlian)

4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat

(setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat).

Tujuan dari dinamika kelompok itu sendiri adalah :

1. Membangkitkan kepekaan diri seseorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai.
2. Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain.
3. Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok.
4. Menimbulkan adanya itikad yang baik diantara sesama anggota kelompok.

Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau lebih



individu yang mengadakan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, struktur dan norma yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa, antara lain:

### 1. Kelompok Primer

Merupakan kelompok yang didalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Sedangkan menurut *Goerge Homan* kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang acapkali berkomunikasi dengan lainnya sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui perantara. *Misalnya*: keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain.

### 2. Kelompok Sekunder

Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. *Misalnya*: partai politik, perhimpunan serikat kerja dan lain-lain.

### 3. Kelompok Formal

Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ada. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contoh dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki AD/ART.

#### 4. Kelompok Informal

Merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas tapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. Misalnya: kelompok arisan.

Suatu kelompok bisa dinamakan kelompok sosial bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki motif yang sama antara individu satu dengan yang lain.  
(Menyebabkan interaksi/kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama)
2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lain. (Akibat yang ditimbulkan tergantung rasa dan kecakapan individu yang terlibat)
3. Adanya penugasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan serta kedudukan masing-masing. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan.

Untuk menanggapi kepentingan yang dimaksud mereka pun saling bersaing, baik dalam persaingan itu membawa identitas individu ataupun identitas kelompok yang lebih terorganisir. Roy C. Macridis (1996:311) mengatakan bahwa ideologi, nilai, negara, organisasi formal, pengambilan keputusan oleh organisasi formal dan isi keputusan ditentukan oleh jajaran jenjang kekuatan-kekuatan kelompok.

Persaingan masing-masing kelompok dalam menggapai tujuannya begitu tajam dan tidak jarang persaingan itu diwarnai dengan konflik antar kelompok. Teoritis kelompok telah melarutkan kehidupan manusia kedalam konflik yang terus menerus. Keterbatasan teoritis kita untuk menjelaskan perilaku, sangat terbatas dan diperparah lagi oleh kekotoran dan kebrutalan serta ketiadaan akan kepuasan terhadap hidup ini yang kesemuanya menjadi determinan akan kerakusan. Mungkin sudah takdir manusia dimana kepentingan menjadi cerminan hidupnya.

Bagi seorang Roy C. Macridis meragukan teori kelompok realistik dan kelompok adalah konsep yang lebih berguna secara analisis daripada kelas, karena baginya analisis kelompok mempunyai implikasi normatif. Selain itu konsep kelompok dan kepentingan kabur secara analisis dan bagi Roy C. Macridis (1996:312) konsep kelompok dan kepentingan sama kaburnya dengan kelas.

Petani, buruh, pebisnis dan lain-lain adalah suatu kelompok yang sering menjadi objek penelitian. Anggota mereka mempunyai persepsi umum mengenai kepentingan yang menjelaskan pembentukan kelompok dan artikulasinya. Studi deskriptif dan komparatis akan menunjukkan perbedaan mengenai pola interaksi kekuatan dan bentuk-bentuk tindakan kelompok, termasuk dalam mendeskripsikan hubungan kelompok kepentingan dengan partai politik dalam kaitannya dengan suatu sistem politik.

Ditinjau dari sudut pandang "teori kelompok" maka untuk menjelaskan perbedaan yang sedemikian itu, maka sangatlah susah. Katakanlah misalnya serikat petani nasional di Inggris yang begitu terorganisir dimana anggotanya 90 persen petani. Sementara di Amerika Serikat dan Prancis relatif tidak terorganisir. Lebih dari 85 persen kepentingan manufaktur di Inggris mewakili asosiasi nasional tersebut sedangkan di Amerika Serikat kurang dari 6 persen. Selain itu lebih dari 50 persen buruh menjadi terorganisir dan tergabung dalam organisasi induk yaitu TUC. Sementara di Prancis keanggotaan yang didasarkan pada identitas yang sama yaitu buruh masih tersebar pada beberapa organisasi.

Roy C. Macridis (1996:315) mengatakan bahwa sebenarnya salah satu usaha yang paling meresap dari kelompok-kelompok kepentingan Perancis ialah memerdekakan diri mereka dari suatu kebudayaan politik yang terbagi dan mampu mengorganisasi anggota mereka atas dasar kepentingan

saja, dan mereka sering gagal, kegagalan itu telah menunjukkan arti penting dan faktor-faktor independen, politik dan ideologis. Kelompok kepentingan di Italia demikian halnya di Perancis, dimana kelompok-kelompok kepentingan di dunia negara tersebut melakukan gerakan-gerakan dalam sub-kultur politik seperti misalnya komunis, sosialis, katolik dan sebagainya. Sebagai akibat dari gerakan-gerakan kelompok kepentingan pada kedua negara tersebut diatas adalah menjamurnya kelompok-kelompok kepentingan.

Demikian halnya organisasi-organisasi kepentingan di Swedia dan tiba kepada sebuah pernyataan bahwa politik kompromi pada umumnya tidak bisa dipisahkan dan organisasi-organisasi kepentingan. Organisasi-organisasi kepentingan ini berusaha menjaga keseimbangan dan keamanan masing-masing organisasi kepentingan tersebut. Termasuk dalam membuat konsesi dan mencapai tujuan. Kesemuanya itu tidak terlepas dari sifat pluralis masyarakat Swedia yang diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kondisi organisasi kepentingan seperti diatas dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan peranan-peranan organisasi kepentingan, simbiosis-simbiosis dari tiap organisasi kepentingan itu dalam usaha pencapaian tujuan tertentu. Disisi lain penelitian Jean Meyhand di Prancis (Macridis, 1996:316) menyimpulkan bahwa fragmentasi kelompok berpangkal dari perbedaan pandangan publik dan ideologi.

## **2. Jenis-jenis Kelompok Kepentingan**


Ditinjau dari segi struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungannya, kelompok kepentingan terdiri dari empat jenis (Mochtar Masoed, 1995:51) diantaranya adalah kelompok Anomik, kelompok non-Assosional, kelompok Institusional, kelompok Assosiasional. Kelompok – kelompok kepentingan tersebut diatas memiliki karakter tersendiri dan perbedaan-perbedaan sangat mempengaruhi kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Pada umumnya kelompok kepentingan yang paling terpengaruh adalah kelompok kepentingan yang berdasarkan atas latar belakang pekerjaan atau profesi, karena kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah paling berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dan karier individu.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran tentang jenis-jenis kelompok kepentingan yang dimaksud:

### **1. Kelompok Anomik**

Kelompok Anomik salah satu jenis kelompok kepentingan yang dimaksud. Kelompok kepentingan sejenis ini terbentuk secara spontan dan bersifat sementara karena tidak diikat oleh nilai dan norma, kelompok ini sering muncul dengan partisipasi politik non konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya. Kelompok Anomik biasanya muncul ketika kepentingannya tidak terwakili dalam sistem politik, sehingga





muncullah kekecewaan dikalangan mereka. Kekecewaan yang menumpuk biasanya memancing mereka untuk melakukan partisipasi politik non konvensional.

## **2. Kelompok Non-Assosional**

Kelompok Non-Assosional kurang lebih memiliki kemiripan dengan kelompok Anomik. Kelompok kepentingan non assosional relative tidak terorganisir. Kelompok kepentingan Non-Assosional biasanya berlatar belakang keluarga, etnis, status dan kelas, dimana kelompok kepentingan Non-Assosional ini dalam keadaan tertentu mereka menyuarkan kepentingannya, melalui misalnya pemimpin agama, idik-idik dan kepala keluarga. Kelompok kepentingan Non-Assosional pada umumnya kita temui pada masyarakat yang kurang maju, dimana patron-klien masih kental, kesetian pada tokoh agama, pemimpin suku menjadi nuansa utama dalam kehidupan politiknya. Tetapi bukan berarti kelompok Non-Assosional tidak akan ditemui di negara-negara industri.

## **3. Kelompok Institusional**

Lain halnya dengan kelompok Institusional, kelompok kepentingan yang berada dalam kategori ini pumumnya lebih terorganisir dan bersifat formal. Kelompok kepentingan institusional disamping melakukan fungsi artikulasi kepentingan, juga memainkan fungsi yang

membuat kelompok kepentingan punya warna dalam panggung politik sehingga tidak mengherankan kalau kelompok kepentingan ini dilirik oleh organisasi-organisasi seperti partai politik, badan legislatif dan sebagainya karena kelompok ini memiliki basis organisasi yang kuat.

#### **4. Kelompok Asosiasional**

Kelompok Asosiasional merupakan kelompok kepentingan yang terorganis bahkan kelompok kepentingan Asosiasional menggunakan tenaga profesional dan bekerja penuh. Disamping itu kelompok kepentingan ini telah merumuskan dan menetapkan agenda-agenda yang akan mereka tempuh. Kelompok Asosiasional dapat berupa serikat buruh, perkumpulan usahawan, paguyuban etnik dan sebagainya.

Salah satu contoh Asosiasional yang turut melakukan perundingan dengan pemerintah yaitu Federasi Baja di Inggris yang anggotanya dari direktur perusahaan-perusahaan terkemuka. Federasi ini sering melakukan perundingan dengan pemerintah setempat dalam peencanaan undang-undang di parlemen. Kelompok kepentingan Asosiasional bila dibiarkan berkembang akan mempengaruhi kelompok kepentingan lain.



### **3. Arti Kelompok Kepentingan dan Fungsinya**

Dalam proses politik lokal maupun proses politik nasional, akan tampil kelompok-kelompok yang bergerak secara aktif termasuk adalah pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai langkah awal perwujudan demokratisasi di daerah pada khususnya, kelompok-kelompok yang bergerak secara aktif dalam proses politik yang dimaksud, biasanya berbentuk kelompok kepentingan, kelompok penekan dan partai politik. Kelompok kepentingan dapat diartikan sebagai agen-agen politik dan kelompok yang mampu melakukan mobilisasi politik, dengan kelompok kepentingan dapat didefinisikan sebagai salah satu organisasi yang dapat dijadikan oleh anggota masyarakat sebagai wadah dalam melakukan aktifitas politik pada umumnya berupa upaya untuk mempertahankan gagasan posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, pada sistem politik yang bersangkutan.

Ditinjau dari sudut fungsi, kelompok kepentingan sedikit memiliki kemiripan fungsi dengan kelompok-kelompok yang bergerak aktif di dalam suatu sistem politik seperti kelompok penekan dan kelompok formal seperti partai politik. Kelompok kepentingan terbatas fungsinya dibanding kelompok politik formal seperti partai politik yang mampu melakukan fungsi sebagai sosialisasi politik, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, komunikasi politik dan pendidikan politik.

Menurut David B. Truman dalam bukunya "The Governmental Process" (1951), yang menyatakan bahwa kelompok kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat. Dan kelompok kepentingan itu akan mempunyai arti politis, kalau kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan.

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya dan sebagainya

Lain halnya dengan kelompok kepentingan yang tidak memiliki fungsi sebagaimana fungsi daripada partai politik. Fungsi utama yang dilakukan oleh kelompok kepentingan terbatas, hanya pada fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Perbedaan yang paling mendasar yang terdapat pada kelompok kepentingan dibandingkan dengan kelompok-kelompok politik lainnya adalah, kelompok kepentingan berusaha memajukan, mempertahankan atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau yang khas.

Kelompok politik seperti partai politik lebih mempertahankan atau mewakili spektrum yang lebih luas dari sikap. Jika dibandingkan dengan

partai politik maka kelompok kepentingan lebih banyak memiliki kemiripan dengan kelompok kepentingan, untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel yang menampilkan perbedaan antara kelompok kepentingan, kelompok penekan dan partai politik:

Perbedaan kelompok kepentingan, kelompok penekan dan partai politik.

Jenis	Hubungan Pemimpin dan pengikut	Aspek Kepentingan	Tujuan Organisasi	Luas Dukungan	Stabilitas
1. Kelompok Kepentingan	Relatif teratur, terutama dekade	Spesifik	Merumuskan kepentingan massa secara damai.	Sempit	Stabil
2. Kelompok Penekan	Pemilihan elit, Tidak teratur	Spesifik	Sedikit menggunakan paksaan untuk menyampaikan tuntutan.	Sempit	Temporal
3. Partai Politik	Teratur sepanjang waktu	Luas dan bervariasi	Memunculkan kandidat untuk jabatan public, membentuk pemerintahan	Luas	Stabil

Sumber: Riza Noer (1996:162)

Dengan demikian jika diperhatikan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan dan kelompok penekan adalah sebagai kelompok yang terbatas fungsinya dalam sistem politik formal. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan hanya sebatas menghimpun kepentingan dan terutama masyarakat, kelompok tersebut tidak terlibat

secara langsung dalam pembentukan pemerintah, termasuk merekrut elit untuk ditampilkan sebagai kandidat dalam sebuah jabatan publik.

Tujuan daripada kelompok kepentingan pun terbatas pada introduksi, pencabutan terhadap peraturan tertentu, perlindungan kelompok khusus dalam masyarakat dan promosi ideologi, kepercayaan, prinsip atau ide-ide tertentu. Ditinjau dari pengaruh kelompok kepentingan pun hanya bisa menarik simpatik atau dukungan dalam masyarakat yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan organisasi politik seperti partai politik.

Dalam proses politik, elit-elit politik bahkan sampai kepada identitas organisasi formal elit politik yaitu partai politik tidak jarang berusaha untuk memperoleh dukungan dari kelompok kepentingan dalam upaya pencapaian tujuan politiknya yaitu dalam memperoleh jabatan politiknya termasuk dalam proses politik lokal seperti misalnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dewasa ini kelompok kepentingan dan partai politik sudah memiliki batasan fungsi dalam panggung politik. Berbeda halnya pada awal-awal pasca kemerdekaan, batas fungsi kelompok dengan fungsi partai politik, masih tergolong kabur karena kelompok kepentingan maju karena politik layaknya partai politik. Kelompok kepentingan secara aktif mengangregasikan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat, bahkan menjadi suatu kekuatan politik yang mampu mempengaruhi agenda politik nasional.

Dalam mengamati dinamika kelompok kepentingan sebagai mesin politik yang biasa menyerukan suara rakyat dan kelompok tertentu di Indonesia pada khususnya, maka parameter yang bisa dan umumnya digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kemampuan kelompok kepentingan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator aspirasi masyarakat.
- b. Kemampuan dalam membongkar dan menjual isu-isu politik dalam rangka menarik minat opini public untuk mengungkap isu-isu politik tersebut.
- c. Tingkat kemampuan kelompok kepentingan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu lobi-lobi pada khususnya.

Dengan berdasarkan parameter yang digunakan dalam memotret kelompok kepentingan tersebut diatas, maka berdasarkan literature penulis mencoba menguraikan dinamika kelompok kepentingan di Indonesia pada khususnya:

1. Kelompok kepentingan sebagai mediator aspirasi masyarakat.

Dalam sejarah sistem politik Indonesia mencatat bahwa partai-partai yang tergolong tua, lahir dari kelompok kepentingan, dalam artian bahwa partai politik tersebut awalnya tidak berbentuk partai akan tetapi berbentuk kelompok kepentingan dan untuk membuktikan kebenarannya, kembali kita mengingat sejarah kancah perpolitikan di Indonesia. Pada akhir abad ke XIX,

organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah dan organisasi lainnya yang telah aktif menyikapi masalah-masalah politik ketika itu. Namun demikian kelompok yang masih berbentuk kelompok kepentingan ini sadar bahwa gerakan-gerakan politik akan lebih efektif jika terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pemutusan kebijakan.

Kelompok-kelompok tersebut sadar, untuk bersentuhan langsung dengan pemerintah termasuk keterlibatan dalam mengambil kebijakan public maka dibutuhkan suatu organisasi politik formal yang mampu memberikan jabatan politik dalam pemerintahan dan organisasi itu adalah partai politik. Namun ketika itu partai politik masih membawa ciri kelompok kepentingan.

Partai politik yang dibentuk ketika itu lebih menampilkan sosok organisasi politik perwakilan yang didasarkan atas kesamaan etnis, daerah, kepercayaan, dan golongan tertentu, sehingga batas fungsi kelompok kepentingan dengan partai politik ketika itu masih abu-abu. Partai Nasional Indonesia (PNI) misalnya ketika itu diidentikkan dengan kelompok masyarakat miskin, Masyumi yang diidentikkan dengan kaum kelompok masyarakat muslim.

Batas antara kelompok kepentingan dan partai politik mulai jelas pada Pemilu 1955. Kelompok kepentingan pun ketika itu menjadi incaran partai politik, partai politik khususnya partai politik yang punya warna dalam kancah perpolitikan Indonesia berlomba-lomba mencari dukungan demi kelompok



kepentingan khususnya kelompok kepentingan yang sejalan dengan mereka. Beberapa kelompok kepentingan yang menjadi incaran menerima tawaran dari partai politik yang sejalan dengan kelompok kepentingan tersebut, misalnya Masyumi yang memperoleh dukungan dari Hisbullah dan Sabillah, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memperoleh dukungan dari Barisan Pelopor, Parkindo yang memperoleh dukungan dari Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).

Kejelasan batas fungsi antara kelompok kepentingan dengan partai politik ketika tidak bisa bertahan lama dan kembali mengalami kekaburan antara tahun 1959 sampai tahun 1966. Kelompok kepentingan pun kembali berlagu layaknya partai politik, seperti saksi dan HMI. Kejelasan batas fungsi antara kelompok kepentingan dengan partai politik kembali jelas ketika muncul sistem kepartaian Hegemonik tepatnya pada tahun 1971.

Kemudian dengan kehadiran Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 dimana undang-undang ini tidak membedakan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan kedua organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas). Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 ketika itu menyatakan bahwa, untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan sejenis dan pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah berhak membekukan pengurus

pusat ormas bila melanggar syarat-syarat tertentu dengan demikian langkah kelompok kepentingan ketika itu pun sangat sempit.

2. Kelompok kepentingan sebagai pembuat isu-isu politik.

Parameter yang kedua dalam memotret dinamika kelompok kepentingan di Indonesia pada khususnya. Suatu kelompok kepentingan harus pandai memposisikan dirinya dan tidak menjadi kelompok pasif yang harus mendengar dan menerima isu-isu politik begitu saja. Tetapi sebuah kelompok kepentingan harus mampu menciptakan dan menjual isu-isu politik kepada masyarakat dan sebagai kelanjutan dari respon tersebut adalah aspirasi demi masyarakat.

Peranan kelompok kepentingan dalam menjual isu-isu politik kepada masyarakat harus dilaksanakan secara aktif sebab tidak sedikit dari masyarakat yang tahu akan masalah politik tetapi tidak memahami dan tidak mampu merumuskan masalah itu secara tepat dan jelas sehingga masalah itu pun didiamkan saja dan diabaikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kelompok kepentingan tentu sadar akan pentingnya peranan sebagai pencipta isu-isu politik, tetapi persoalan kemudian pemerintah pun berusaha merangkul kelompok-kelompok kepentingan itu, sehingga tidak mendapat ruang gerak yang cukup untuk menjalankan peran itu. Sehingga kelompok kepentingan yang muncul dalam sistem politik pun bukanlah kelompok kepentingan yang independen.



Kelompok kepentingan dijadikan oleh pemerintah sebagai kelompok untuk memobilisasi massa dalam rangka mengsucceskan program-program pembangunan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah. Pemerintah memasang strategi untuk meminimalkan keikutsertaan masyarakat yang hanya sebatas sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi.

### 3. Kelompok kepentingan sebagai kelompok yang melakukan lobi.

Kelompok kepentingan merupakan kelompok dimana strukturnya di tempati oleh mereka-mereka yang berada pada *middle class* atau level yang lebih di atas, entah berdasar pada tingkatan kemampuan ekonomi ataupun tingkat pendidikannya. Dari kalangan berpendidikan yang bergabung dalam sebuah kelompok kepentingan umumnya dikarenakan tingkat kesulitan untuk memperoleh jabatan dalam birokrasi pemerintah.

Kalangan berpendidikan yang dimaksud di atas, kemudian berfikir untuk berbuat sesuatu demi mencapai tujuan termasuk dalam upaya mewujudkan suatu kemajuan bagi masyarakatnya sehingga mereka juga punya warna di dalam lingkungan dimana mereka berdomisili, atas dasar pemikiran seperti diatas sehingga mereka pun membentuk ataupun bergabung pada suatu kelompok kepentingan. Pada dasarnya bergabungnya ataupun membentuk sejumlah orang suatu kelompok kepentingan pada intinya didirikan pada kesamaan kepentingan. Demikian halnya dengan

kelompok kepentingan yang terbentuk atas latar belakang kepentingan ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Pada umumnya kelompok kepentingan yang menyerukan aspirasi termasuk aspirasi rakyat kedalam mesin politik formal, melakukannya dengan cara melobi dan cara inilah yang mereka anggap sebagai cara yang paling efektif dalam menyampaikan suatu aspirasi karena dengan cara lobi maka mereka bisa berkomunikasi langsung dengan elit-elit kuasa yang punya wewenang dalam merumuskan dan menentukan serta menetapkan suatu kebijakan publik. Dalam melakukan lobi khususnya dalam melakukan lobi-lobi politik haruslah memiliki pengetahuan, pengalaman lapangan, pergaulan yang luas/pengaruh dan kemampuan lainnya yang bisa mendukung keberhasilan lobi.

Biasanya kemampuan kelompok kepentingan yang sudah berumur tua serta memiliki pengaruh yang cukup luas lebih mudah melakukan lobi jika dibandingkan dengan kelompok kepentingan yang baru lahir. Tetapi perlu kita ingat umur suatu kelompok kepentingan bukanlah suatu jaminan keberhasilan dalam melakukan lobi dengan elit-elit tertentu.

#### **4. Teori Pertukaran dan Teori Ketergantungan**

Secara fenomena dari kenyataan yang ada dalam masalah skripsi penulis, permasalahan akan Dinamika Kelompok Kepentingan Dalam

Pemilihan Calon Walikota Makassar berkorelasi dengan teori sosial yakni teori pertukaran dan teori ketergantungan.

#### **- Teori pertukaran**

Jeremy Bentham adalah salah satu pelopor dari teori pertukaran klasik (exchange theory) pada abad ke-18 di kalangan Inggris. Menurutnya : "para penganut prinsip pemanfaatan (utility) terdiri atas mereka yang mengukur baik-buruknya suatu tindakan dengan melihat pada penderitaan dan kesenangan (pain and pleasure) yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Suatu tindakan dianggap adil, baik atau bermoral manakala tindakan tersebut mengakibatkan hal yang menyenangkan; bila suatu tindakan menyebabkan penderitaan maka tindakan tersebut dianggap buruk, tidak adil, tidak bermoral."

Sedangkan Marcell Mauss dan Calude Levi Strauss menyatakan bahwa inti dari teori ini ialah bahwa manusia adalah makhluk yang mencari keuntungan dan menghindari biaya manusia, dalam perspektif para penganut teori pertukaran, merupakan makhluk pencari imbalan. Dan dalam perkembangannya teori ini meninggalkan asumsi utamanya yaitu, bahwa manusia tidak hanya mencari dan menukarkan komoditas material saja namun juga nonmaterial seperti jasa dan perasaan.

Menurut teori pertukaran modern yaitu C.Homans menyatakan bahwa:  
" pertukaran yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial yang

berkesinambungan antara orang tertentu". Pandangan Homans ini dituangkan dalam sejumlah proposisi, salah satu diantaranya berbunyi :

"For all action taken by persons, the more often a particular action is rewarded, the more likely the person is to perform that action".(Homans, 1974 :16)

Menurut proposisi ini seseorang akan semakin cenderung melakukan suatu tindakan manakala tindakan tersebut makin sering disertai imbalan. Dari proses pertukaran semacam inilah, menurut pendapat Homans, muncul organisasi politik dan organisasi sosial baik yang berupa kelompok, institusi maupun masyarakat.

Berbeda dengan pendapat Homans yang cenderung berpendapat bahwa semua interaksi melibatkan pertukaran. Blau berpendapat yang sebaliknya yaitu bahwa tidak semua interaksi melibatkan pertukaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada teori ini semua aktivitas dan perbuatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan, memerlukan sebuah kompensasi dan imbalan atas apa yang dilakukannya.

Pokok pikiran teori pertukaran sebagai berikut : Manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain. Dalam melakukan transaksi sosial manusia melakukan perhitungan untung rugi. Manusia cenderung menyadari adanya berbagai alternatif yang tersedia baginya. Manusia bersaing satu dengan yang lain, hubungan pertukaran secara umum antar individu dalam interaksi.

## **- Teori Ketergantungan**

Teori ini pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah jawaban yang diberikan oleh teori modernisasi. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah.

Teori ini berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx. Salah satu kelompok teori struktural ini adalah teori ketergantungan yang lahir dari 2 induk, yakni seorang ahli pemikiran liberal Rauf Prebisch dan teori-teori Marx tentang imperialisme dan kolonialisme serta seorang pemikir marxis tentang cara produksi Asia yaitu, Paul Baran.

Ada 6 inti pembahasan dari teori ketergantungan, yaitu :

1. Pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus. Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sistem dunia. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara pinggiran hanya sebagai pelengkap. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalis dunia menjadi perhatian pendekatan ini.

2. Pakar eksternal melawan internal. Para pengikut teori ketergantungan tidak sependapat dalam penekanan terhadap dua faktor ini, ada yang beranggapan bahwa faktor eksternal lebih ditekankan. Seperti

Frank De Santos. Sebaliknya ada yang menekan faktor internal yang mempengaruhi/menyebabkan ketergantungan seperti Cordosa dan Faletto.

3. Analisis ekonomi melawan analisis sosial politik Raul Plebiech memulainya dengan memakai analisis ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkannya juga bersifat ekonomi. AG Frank seorang ekonom, dalam analisisnya memakai disiplin ilmu sosial lainnya, terutama sosiologi dan politik. Dengan demikian teori ketergantungan dimulai sebagai masalah ekonomi kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik dimana analisis ekonomi hanya merupakan bagian dan pendekatan yang multi dan interdisipliner analisis sosiopolitik menekankan analisa kelas, kelompok sosial dan peran pemerintah di negara pinggiran.

4. Kontradiksi sektoral/regional melawan kontradiksi kelas. Salah satu kelompok penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara-negara pusat dengan pinggiran ini merupakan analisis yang memakai kontradiksi regional. Tokohnya adalah AG Frank, sedangkan kelompok lainnya analisis kelas seperti Cardoso.

5. Keterbelakangan melawan pembangunan. Teori ketergantungan sering disamakan dengan teori tentang keterbelakangan dunia ketiga. Para pemikir teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos Cardoso, Evans menyatakan bahwa ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring.



Yang perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi dalam konteks ketergantungan.

6. Voluntarisme melawan determinisme, penganut marxis klasik melihat perkembangan sejarah sebagai suatu yang deterministic. Masyarakat akan berkembang sesuai tahapan dari feodalisme ke kapitalisme dan akan kepada sosialisme. Penganut Neo Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui teori ketergantungan. Menurutnya kapitalisme negara-negara pusat berbeda dengan kapitalisme negara pinggiran. Kapitalisme negara pinggiran adalah keterbelakangan karena itu perlu diubah menjadi negara sosialis melalui sebuah revolusi. Dalam hal ini Frank adalah penganut teori Voluntaristik.

## **5. Konsep Pilkada Langsung**

### **Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota**

Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, menyatakan bahwa dalam Pasal 36 Bagian pertama:

1. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan.

2. Partai politik atau Gabungan Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari

jumlah kursi DPRD atau 15%(lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Keputusan-keputusan dan pilihan politik yang langsung dilaksanakan oleh warga yang berbeda dalam sistem politik tersebut pertama kali dilaksanakan oleh Yunani Kuno yang biasa disebut City State, proses politik seperti ini dikenal dengan istilah demokrasi langsung (*direct democracy*). Sistem pemilihan langsung yang dilaksanakan di Yunani Kuno pada pertengahan abad ke-6 ketika itu dapat terlaksana dengan efektif karena didukung oleh jumlah penduduk yang relative sedikit dan wilayah yang sempit.

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang baru-baru ini dilaksanakan di sejumlah Kabupaten di Indonesia merupakan pengadopsian dari sistem politik Yunani Kuno dalam rangka perwujudan demokrasi ditingkatan lokal pada khususnya, merupakan awal penciptaan tonggak demokrasi yang lebih tangguh. Pemilihan kepala daerah secara langsung

merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pada pasal 50 ayat 1.

Ni'Matul Huda, S.H, M.Hum (2005, 204) mengemukakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah sebuah proses politik yang perlu dilaksanakan dengan baik dengan berangkat dari dua alasan yaitu:

1. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat itu sendiri.
2. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak berhenti di tengah jalan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung, tidaklah sebatas memilih pemimpin lokal yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan rakyatnya, dan pandangan terhadap kepala daerah sebagai pemimpin yang dilayani yang selama ini mendarah daging harus diubah. Sosok pemimpin yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan demokratis, haruslah menjadi pemimpin yang senantiasa melayani masyarakatnya. Tugas terpenting yang perlu diingat oleh seorang pemimpin lokal (Kepala Daerah) adalah bahwa dia harus memberikan pelayanan yang tepat, jujur dan adil kepada rakyatnya.

## **Tugas dan Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah**

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rencana Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 27 diatur tentang kewajiban kepala daerah beserta wakilnya, sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintah yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah.
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintah daerah dihadapan rapat paripurna DPRD.

## **6. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan proposal ini, penulis mengacu pada teori kelompok – kelompok kepentingan menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku *Comparative Politics Today : A World View* (1992). Yang telah diedit bersama, membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori, yaitu

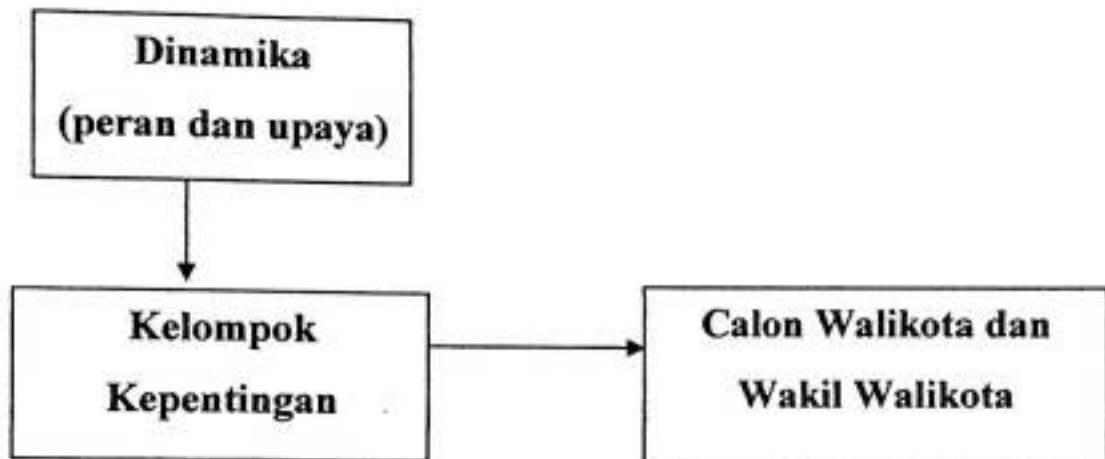
: (a) kelompok anomie (*anomic groups*), (b) kelompok non-asosiasional (*non-associational groups*), (c) kelompok institusional (*institutional groups*), dan (d) kelompok asosiasional (*associational groups*).

Kelompok kepentingan dapat dipandang dari segi besarnya, keanggotaannya, kepemimpinannya, organisasinya, hubungannya dengan partai politik, dan sarana yang digunakan untuk memobilisasi pendapat publik, mendapatkan akses kenegaraan dan mempengaruhi keputusan. Analisis dari kelompok ini membawa penulis secara langsung kepada jantung proses politik-konflik sosial dan pemecahannya. Dengan mempelajari dunia kelompok kepentingan dalam suatu sistem politik dapat memperoleh pandangan yang baik mengenai distribusi kekuasaan di masyarakat dan cara mengorganisasi serta mengungkapkan kepentingan.

Pergerakan kelompok-kelompok kepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota, adalah dinamika sebagai pengakuan eksistensi dari kelompok kepentingan. Untuk mencapai tujuan sebagai suatu keberhasilan kelompok kepentingan, maka diupayakanlah berbagai macam intrik-intrik politik. Yang mana sebelumnya terdapat kesepakatan antara kelompok kepentingan dan pasangan calon walikota dan wakil walikota. Dengan begitu para kelompok berusaha mempengaruhi massanya dan masyarakat umum dan kemudian menterjemahkan kepentingan mereka itu ke dalam keputusan politik.



Dari uraian di atas, maka kerangka analisis yang dapat digambarkan dalam skema hubungan sebagai berikut :



## 7. Defenisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan dan batasan-batasan variabel yang menjadi objek penelitian ini, serta untuk memudahkan penelitian, maka definisi secara operasional komponen yang sesuai dengan penelitian:

### 1. Dinamika

*Dinamika* yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah interaksi antara kelompok – kelompok kepentingan dengan para calon walikota dan wakil walikota yang ikut dalam pemilihan kepala daerah di Makassar. Bagaimana perilaku-perilaku politik mereka dalam mengusung dan mendukung elit politik lokal yang memperebutkan kekuasaan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pengejaran kekuasaan oleh individu atau kelompok adalah suatu fenomena yang universal, baik individu atau pun kelompok. Proses

dengan mana kelompok-kelompok bersaing demi kedudukan atau pun kepentingan tertentu dalam suatu sistem politik. Kelompok-kelompok kepentingan ini biasanya mengumumkan atau menghubungkan kepentingan mereka dengan orientasi ideologi.

## 2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan organisasi yang individu-individunya memiliki kepentingan yang sama dan berada dalam susunan formal maupun informal, sifatnya temporari atau senantiasa ada. Kelompok kepentingan disini berfungsi untuk mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kesempatan ini, peneliti lebih menfokuskan perhatiannya pada dinamika kelompok kepentingan dalam pemilihan calon Walikota, khususnya di wilayah Kota Makassar.

## 3. Pemilihan Calon Walikota Makassar

Untuk pertama kalinya di Makassar, diadakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota periode tahun 2009-2014. Calon yang ikut serta berjumlah tujuh orang, yang menarik karena dari beberapa calon tersebut beberapa diantaranya berasal dari golongan independen atau non-partai. Apalagi pada pilkada kali ini, salah satu pasangan calonnya adalah perempuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan ini akan diuraikan 5 aspek. Pertama, tipe dan dasar penelitian, kedua, lokasi penelitian, ketiga, teknik pengumpulan data, keempat, jenis data, dan terakhir analisis data. Kelima aspek ini akan diuraikan lebih jelas.

#### **A. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian**

##### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif analisis. Penelitian yang berusaha menggambarkan dan menganalisis dinamika kelompok-kelompok kepentingan dalam Penentuan calon Walikota di Kota Makassar.

##### **2. Dasar penelitian**

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi permasalahan penelitian guna pengumpulan data dengan mengambil sample yang dianggap dapat mewakili.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, dengan asumsi bahwa Kota ini telah dilaksanakan pemilihan walikota secara langsung. Yang telah

berlangsung pada bulan Oktober 2008, selain itu melihat banyaknya kelompok kepentingan yang mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Sehingga mudah diketahui bagaimana peran dari kelompok kepentingan tersebut dalam pelaksanaan walikota di Kota Makassar. Waktu penelitian ini berjalan 1 bulan, mulai dari tanggal 6 Februari 2009 sampai 6 Maret 2009.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara (Interview)**

Melakukan wawancara secara mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi yang detail dalam rangka pengumpulan data. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis mewawancarai informan yang menjadi sumber data secara langsung dan mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara.

#### **2. Studi Pustaka (Library Research)**

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berdasarkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian.

Dengan membaca sumber-sumber literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Di samping itu penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai kelompok-kelompok kepentingan dan pemilihan kepala daerah berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah, surat-kabar, opini, dan informasi tertulis lainnya

#### **D. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut akan diperoleh melalui:

1. Untuk data primer; diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, dimana wawancara tersebut tentunya berhubungan dengan penelitian yaitu dinamika kelompok kepentingan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Makassar.
2. Untuk data sekunder sebagai pelengkap dan pendukung data primer diperoleh dari buku-buku/tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan diolah dan dianalisa untuk melihat kecenderungan-kecenderungan tentang penelitian yang dimaksud. Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan

untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, sesuai dengan masing-masing masalah penelitian yang diteliti. Adapun teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian ini secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan tentang dinamika kelompok kepentingan dalam memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN



Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk lebih memperjelas dan mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan bab-bab sebelumnya, maka pada bab IV ini akan diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian penulis, meliputi: pertama adalah sejarah kota Makassar, kedua adalah kondisi geografis kota Makassar, ketiga adalah kondisi sosial ekonomi kota Makassar, keempat adalah kondisi politik dan pemerintahan, dan terakhir kelima adalah kondisi pelaksanaan pemilihan walikota di kota Makassar.

#### A. Sejarah Kota Makassar

Awal Kota dan bandar makassar berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan kerajaan-kerajaan sekitarnya.<sup>1</sup> Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara

---

<sup>1</sup> Sumber: [www.makassarkota.go.id](http://www.makassarkota.go.id)

sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI ini didirikan pula Benteng Rotterdam di bagian utara, Pemerintahan Kerajaan masih di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pada masa itu terjadi peningkatan aktifitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan Internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah di Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan Saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting Saudagar Melayu dalam perdagangannya yang berdasarkan pertukaran surplus pertanian dengan barang-barang impor itu. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula, maka Makassar meningkatkan produksi komoditi itu dengan berarti, bahkan, dalam menyerang kerajaan-kerajaan kecil tainnya, para ningrat Makassar bukan hanya menguasai kawasan pertanian lawan-tawannya itu,

akan tetapi berusaha pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat agar berpindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru itu.

Dalam hanya seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (dan dengan ini termasuk ke-20 kota terbesar dunia Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, kota terbesar musuh utamanya, Belanda, baru mencapai sekitar 60.000 orang) yang bersifat kosmopolitan dan multikultural. Perkembangan bandar Makasar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511, demikian di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan kerajaan Mataram. Bahkan ketika Malaka diambil-alih oleh Kompeni Dagang Belanda VOC pada tahun 1641, sekian banyak pedagang Portugis ikut berpindah ke Makassar.

Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram

dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam Dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah. Setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater menjadi kembali suatu bandar internasional.

Dengan semakin berputarnya roda perekonomian Makassar, jumlah penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal abad berikutnya. Makassar abad ke-19 itu dijuluki "kota kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda" (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-Polandia terkenal), dan menjadi salah satu port of call utama bagi baik para pelaut-pedagang Eropa, India dan Arab dalam pemburuan hasil-hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun perahu-perahu pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan

kolonial Indonesia Timur. Tiga-setengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan pesat. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan.

## **B. Kondisi Geografis Kota Makassar**

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya

berjumlah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik.

### **C. Kondisi Sosial Ekonomi Kota Makassar**

Kota Makassar merupakan daerah yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi, hal ini dikarenakan kota ini merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan letak geografisnya berada pada posisi strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia yang implikasinya adalah derasnya arus urbanisasi, maupun migrasi dari daerah Tingkat II lainnya dan Provinsi lainnya.



## 1. Penyebaran dan Komposisi Penduduk

Penduduk Kota Makassar tahun 2006 tercatat sebanyak 1.223.540 jiwa yang terdiri dari 611.049 laki-laki dan 612.491 perempuan. Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2005 tercatat sebanyak 1.193.434 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin Kota Makassar yaitu sekitar 99,76 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 99 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 148.589 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 139.491 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 131.229 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.941 jiwa (2,28 persen).

Namun jika ditinjau dari kepadatan penduduk per km persegi, kecamatan Makassar yang terpadat yaitu 32.093 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso (29.293 per km persegi), kecamatan Bontoala 28.703 jiwa per km persegi). Sedang kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.605 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea 2.732 jiwa per km persegi,

Manggala (4.003 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (7.957 jiwa per km persegi), kecamatan Panakkukang (10.071 jiwa per km persegi). Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di tiga kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala.

**Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Dirinci  
Menurut Wilayah Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2006**

KECAMATAN	LUAS (Km2)	JUMLAH RW	JUMLAH RT	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUDUK	% TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (Per Km2)
MARISO	1,82	46	212	12.849	53.314	4,36	29.293
MAMAJANG	2,25	57	295	15.703	58.968	4,82	26.208
TAMALATE	18,18	91	498	32.091	148.589	12,14	8.173
RAPPOCINI	9,23	104	522	27.690	139.491	11,40	15.113
MAKASSAR	2,52	69	375	15.362	80.874	6,61	32.093
UJUNG PANDANG	2,63	37	142	6.706	27.941	2,28	10.624
WAJO	1,99	45	170	10.821	34.178	2,79	17.175
BONTOALA	2,10	56	246	13.577	60.276	4,93	28.703
UJUNG TANAH	5,94	51	206	10.804	47.267	3,86	7.957
TALLO	8,75	77	474	34.770	132.158	10,80	15.104
PANAKKUKANG	13,03	90	438	26.196	131.229	10,73	10.071
MANGGALA	24,14	60	314	23.955	96.632	7,90	4.003
BIRINGKA NAYA	48,22	87	387	34.835	125.636	10,27	2.605
TAMALANREA	31,84	63	301	21.824	86.987	7,11	2.732
<b>JUMLAH</b>	<b>175,77</b>	<b>933</b>	<b>4.580</b>	<b>287.184</b>	<b>1.223.540</b>	<b>100,00</b>	<b>7.087</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar

## **2. Kondisi Penduduk Makassar Berdasarkan:**

### **a. Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Untuk itu penyediaan prasarana pendidikan menjadi sangat penting, karena konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2006/2007 di Kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 463 unit dengan jumlah guru sebanyak 5.103 orang dan jumlah murid sebanyak 124.975 orang. Jumlah SLTP sebanyak 165 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.027 orang dan jumlah murid sebanyak 55.997 orang. Jumlah SLTA 106 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.533 orang dan jumlah murid sebanyak 35.674 orang.

### **b. Agama**

Penduduk kota Makassar menganut agama yang beragam, dari lima agama yang diakui oleh negara tercakup di dalamnya, namun agama yang mayoritas adalah agama Islam, disusul Kristen. Sedangkan agama paling kurang penganutnya adalah agama Budha. Disamping kelima agama

tersebut di atas, di kota Makassar pula penduduk yang menganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa mesjid dan mushalla pada tahun 2006 masing-masing berjumlah 864 buah dan 112 buah. Tempat peribadatan Kristen berupa gereja masing-masing 90 buah gereja protestan dan 57 buah gereja katolik. Tempat peribadatan untuk agama Budha dan Hindu masing-masing berjumlah 23 buah dan 1 buah.

### **c. Keadaan Ekonomi**

Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft Kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis – Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia. Saat ini kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Maminasata.

Kota Makassar memiliki prospek dan peluang amat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi hal ini tampak dari aktivitas perdagangan, industri, pengembangan usaha disektor nonmigas yang semakin melaju dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Melihat kondisi tersebut dari sembilan sektor yang ada ternyata empat faktor yang dominan/andalan dalam menunjang perekonomian di kota Makassar yaitu: sektor industri, sektor pertanian, sektor tenaga kerja dan sektor perdagangan, koperasi dan perbankan. Sedangkan sektor lainnya meliputi sektor perdagangan, perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan, jasa-jasa dan sektor angkutan dan komunikasi.

#### **D. Kondisi Politik dan Pemerintahan**

Kota Makassar merupakan daerah kota yang bersifat otonom, penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Makassar adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lainnya sebagai badan eksekutif daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan, Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada presiden melalui menteri dalam negeri, dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 44. Kota Makassar dalam kancah perpolitikan, terutama Pemilu mulai tahun 1955 sampai 2004 (masa



Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi) banyak diikuti oleh partai politik, diantaranya:

1. Pada masa Orde Lama (Pemilu 1955), Pemilu pada tahun ini dimeriahkan oleh 29 parpol, diantaranya; Partai Persatuan Indonesia Raya, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Rakyat Nasional, Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Front Nasional, Partai Serikat Islam Indonesia, Parkindo, Partai Katholik Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Tarekat Islam dan Partai Federal Indonesia.
2. Pada masa Orde Baru (Pemilu 1971 – 1997), masa di bawah tampuk kepemimpinan Soeharto peserta Pemilu, diantaranya: Partai MURBA, Nahdlatul Ulama, PARTI, Partai Katholik, Parkindo, Partai Muslimin, Partai Nasional Indonesia, PSII. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua parpol yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu Golongan Karya.
3. Pada masa Reformasi (1999 dan 2004), masa ini terjadi transisi sistem pemilihan umum di Indonesia, khususnya Makassar. Pemilu tahun 1999 melibatkan 48 parpol yaitu; PIB, KRISNA, Partai Nasional Indonesia, PADI, KAMI, PUI, PKU, Masyumi Baru, Partai Persatuan

Pembangunan, PSII, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, PAY, PKM, PDKB, Partai Amanat Nasional, PRD, PSII 1905, PKD, PILAR, PARI, MASYUMI, Partai Bulan Bintang, PSP, PK, PNU, PNI, FM, IPKI, PR, PID, PNI MM, MURBA, PDI, GOLKAR, PP, PKB, PUDI, PBN, MKGR, PDR, PCD, PKP, SPSI, PNBI, PBI, SUNI, PND, PUMI dan PPI. Sedangkan pada masa Pemilu 2004 melibatkan 24 parpol, yaitu; Partai Nasional Indonesia, PBSD, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, PSDK, PIB, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PPNUI, Partai Amanat Nasional, PKPB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, PBR, PDIP, PDS, Partai Golongan Karya, SILA, PSI, PPD dan Partai Pelopor.

**Perolehan Suara Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 1955 –  
2004 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan**

No	Tahun	Jumlah Partai yang ikut Pemilu	Partai yang menang	Rekapitulasi suara sah Partai pemenang Pemilu
1.	1955	29	PNI	236.265
2.	1971	10	GOLKAR	277.502
3.	1977	3	GOLKAR	281.267
4.	1982	3	GOLKAR	272.302
5.	1987	3	GOLKAR	263.425
6.	1992	3	GOLKAR	274.261
7.	1997	3	GOLKAR	281.182
8.	1999	48	GOLKAR	286.280
9.	2004	24	PGK	192.685

*Sumber: KESBANG Bag. PARPOL dan Arsip Daerah SULSEL*

Selain parpol, kelompok kepentingan juga ikut meramaikan di Kota Makassar. Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, diantaranya: LBH P2I

(Pemberdayaan Perempuan Indonesia), LBH Apik, Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pemerhati Masalah Perempuan SulSel, Koalisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ujung Pandang, Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi, LBH-P2i, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, PWI Reformasi, Cetro, Makassar Intellectual Law (MIL), Lembaga Independen Pemantau Peradilan (LIPPI) Makassar dan lainnya.

#### **E. Kondisi Pelaksanaan Pemilihan Walikota di Kota Makassar**

Pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar telah ditetapkan ada 7 (tujuh) pasangan yang bersaing berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 dengan Kandidat Walikota – Wakil Walikota yaitu Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin MM – Drs. H. Supomo Guntur, MM, dengan jargon IASMO.
2. Nomor urut 2 dengan Kandidat Walikota – Wakil Walikota yaitu H.Andi Idris Manggabarani – Ir.H.A.M.Adil Patu, MPd, dengan jargon IDIAL.
3. Nomor urut 3 dengan Kandidat Walikota – Wakil Walikota yaitu Halim Razak – Jafar Sodding, dengan jargon HALIM-JAFAR.

4. Nomor urut 4 dengan Kandidat Walikota – Wakil Walikota yaitu Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani – Andi Irwan Paturusi, dengan jargon RI.
5. Nomor urut 5 dengan Kandidat Walikota – Wakil Walikota yaitu Firmansyah Mappasawang – Kasma F. Amin, dengan jargon PASMI.
6. Nomor urut 6 dengan Kandidat Walikota – Wakil Walikota yaitu Ir. H. Iriantasyah Kasim, DM. Msi – Abdul Razak Djalle, dengan jargo IKRAR.
7. Nomor urut 7 dengan Kandidat Walikota – Wakil Walikota yaitu H. M. Ilham Alim Bachrie – Herman Handoko, dengan jargon IDOLA.

Ketujuh kandidat di atas ada empat kandidat yang diusung oleh partai politik yaitu Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin MM – Drs. H. Supomo Guntur, H. Andi Idris Manggabarani – Ir. H. A. M. Adil Patu, Halim Razak – Jafar Sodding dan Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani – Andi Irwan Paturusi, sedangkan ketiga lainnya adalah kandidat independen, yaitu Firmansyah Mappasawang – Kasma F. Amin, Ir. H. Iriantasyah Kasim, DM. Msi – Abdul Razak Djalle dan H. M. Ilham Alim Bachrie – Herman Handoko.

Pasangan kandidat ini telah diusung oleh beberapa kelompok kepentingan yang ada di Kota Makassar. Juga memiliki tim sukses meliputi Master Campaign, tim relawan, massa pendukung dan simpatisan yang berusaha bekerja dan memberikan kontribusi dan sumbangsih di dalam memperkenalkan kandidat Walikota. Akan tetapi para kelompok kepentingan ini berupaya untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam rangka memperkenalkan kandidat, mensosialisasikan ke masyarakat dan memberikan warning kepada masyarakat untuk memilih kandidat yang diperkenalkannya. Baik berupa baliho ataupun spanduk yang isinya persuasif mendukung pasangan calon walikota.

**Program serta Visi dan Misi Kandidat Calon Walikota & Wakil Walikota Kota Makassar 2009 – 2014.**

1. Ir. H. Ilham Arief Irajuddin, MM & Drs H. Supomo Guntur, MM (IASmo)

Program Bebas

- Bebas biaya persalinan
- Bebas biaya akta kelahiran
- Bebas biaya angkutan anak sekolah
- Bebas biaya pendidikan
- Bebas biaya KTP, KK, dan kartu nikah
- Bebas biaya bantuan hukum
- Bebas biaya pengantaran dan penguburan jenazah

Partai pendukung dari pasangan ini adalah Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB).

2. H.A. Idris Manggabarani, SE & H.A.M. Adil Patu, Mpd (IDIAL)

Program Perjuangan Idial

- Perumahan murah bagi PNS, Polisi, TNI dan warga marginal Kota Makassar
- Pembukaan 100.000 lapangan pekerjaan
- Program listrik murah
- Pemberian kredit usaha tanpa anggunan (Rp. 1-5 juta) kepada pengusaha kecil
- Pendidikan dan layanan kesehatan gratis berkualitas

Partai pendukung dari pasangan ini adalah Partai Demokrat, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

3. H. Halim Abdul Razak, SE, M.Si & Drs H.M. Jafar Sodding (Mantap Mentong/HAJAR)

8 Program Mantap

- Birokrasi pemerintahan bersih dan profesional
- Pendidikan terjangkau dan berkualitas
- Lingkungan sehat dan layanan kesehatan yang cepat dan bermutu
- Kota baru yang berwawasan lingkungan
- Sistem transportasi massal dan cepat
- Penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM
- Pelayanan publik yang cepat dan mudah



- Membangun kepedulian sosial, budaya, dan keagamaan.

Partai pendukung dari pasangan ini adalah Partai Kedaulatan Sejahtera (PKS), Partai Merdeka, PNI-Marhaenisme, Partai Sarekat Indonesia (PSI), PNBK.

4. H. Ridwan Syahputra Musagani & H. Irwan A. Paturusi (RI)

Program Unggulan RI

- Asuransi jiwa bagi keluarga miskin
- Pemerataan pembangunan infrastruktur pada seluruh wilayah Kota Makassar
- Sekolah gratis SD, SLTP, SLTA
- Pelayanan kesehatan gratis
- KTP dan KK gratis
- Akte kelahiran gratis
- Subsidi akte nikah
- Bebaskan biaya pemakaman
- Menyediakan mobil jenazah secara gratis
- Menyediakan pangkalan air bersih, BBM dan kebutuhan listrik untuk masyarakat pulau.

Partai pendukung pasangan ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN)

5. Firmansyah Mappasawang, SE & Kasma F Amin (PASmi)

Program Utama PASmi

- I. Sosial Agama dan Budaya

- Pendidikan bersubsidi (gratis)
- II. Ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi yang sinkron dengan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja
- III. Lingkungan
- Mewujudkan Makassar hijau
- IV. Kebijakan Internal
- Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
- V. Kebijakan Eksternal
- Peningkatan kerjasama lembaga swadaya masyarakat dan elemen masyarakat lainnya.

6. Ir. H. Iriantasyah Kasim DM, M.Si & Abdul Razak Djalle (BerIKRAR)

Visi : Makassar Sejahtera, Maju, Religius dan Terkemuka (SMART)

Misi :

- Tata kelola pemerintahan yang amanah (Good Governance)
- Peningkatan prasarana dan sarana dan tata ruang kota yang ramah lingkungan
- Layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan, usaha kecil produktif, sektor informal, koperasi dan investasi
- Menjaga khazanah budaya, agama serta kearifan lokal

7. H.A. Ilham Alim Bachrie & Herman Handoko (IDOLA)

Visi dan Misi: Memberdayakan Makassar sebagai kota jasa dan ekonomi.

## Program Utama

- Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
- Kebersihan lingkungan, Makassar hijau, keseimbangan tata ruang
- Transportasi: mewujudkan konsep Mamminasata, membangun monorail dari pusat kota ke bandara
- Memperbaiki sanitasi pencegah banjir
- Memperbaiki sistem pelayanan umum
- Menyiapkan lapangan terbuka dan membangun gelanggang remaja di 14 kecamatan

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai, bagaimana peran kelompok kepentingan dalam mempengaruhi partai politik untuk mengusung pasangan calon walikota dan upaya kelompok kepentingan dalam mengusung calon perseorangan dalam penentuan pasangan calon walikota Makassar, antara lain :

#### **A. Peran Kelompok Kepentingan Dalam Pilkada Walikota Makassar.**

Kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi, sehingga menumbuhkan persamaan bersama. Kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dimana dasar pembentukan kelompok sosial , antara lain adalah faktor kepentingan yang sama, faktor darah dan keturunan, faktor geografis, dan faktor daerah asal yang sama. Sedangkan kelompok kepentingan disini berarti suatu kelompok yang memiliki visi yang sama dalam memenuhi kepentingan secara politik.

Kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung ke pasangan calon ada yang murni memberikan dukungan dan adapula yang melakukan kontrak politik sebelumnya. Dengan massa yang solid, kelompok kepentingan bisa memberikan pengaruh yang luas kepada pasangan calon. Kelompok-

kelompok kepentingan ini menjadi salah satu kekuatan politik. Kekuatan politik sesungguhnya dapat diartikan sebagai kekuatan individual (perorangan) maupun kolektif (kelompok) yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Kekuatan politik kolektif non formal adalah lembaga resmi yang keberadaannya secara hukum sah, lembaga ini bergerak pada kegiatan yang secara formal tidak ada sangkut-pautnya dengan kegiatan politik. Oleh karena itu sering juga disebut sebagai lembaga non politis. Akan tetapi dalam gerakannya, buah pikir yang dihasilkan ternyata mempunyai dampak politis yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, maka organisasi ini dapat dinyatakan sebagai memiliki kekuatan politik kolektif non formal. Contohnya, organisasi massa (ormas) keagamaan seperti Perserikatan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), PERSIS, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Taklim, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Kekuatan politik kolektif formal adalah organisasi yang sejak awal berdirinya diniatkan secara sengaja sebagai organisasi politik. Keberadaannya pun diakui secara resmi oleh pemerintah, terlindungi secara hukum (undang-undang), khusus bergerak dalam kegiatan politik. Misalnya, kelembagaan partai politik (parpol) adalah institusi (lembaga) atau organisasi yang secara sengaja semata-mata hanya untuk tujuan kepentingan

perjuangan politik, sehingga tercermin dalam aktifitas gerakannya, pemikiran, dan segala aspeknya berorientasi pada kepentingan politik. Proses pembentukan dan latar belakang berdirinya partai politik menurut Maurice Duverger, dapat dilihat menjadi dua karakter:

*Pertama*, partai politik yang berdiri atas dorongan individu per individu yang memiliki kesepahaman, kesamaan pandangan, dan satu ideologi, maka mereka sepakat mendirikan partai politik tersebut. Keanggotaannya orang per orang mendaftar mewakili dirinya sebagai unsur insan politik.

*Kedua*, partai politik yang merupakan penjelmaan dari banyak unsur organisasi yang karena merasa perlu untuk membangun kekuatan politik bersama (beraliansi) untuk tujuan suatu perjuangan politik, maka organisasi-organisasi yang sepaham itu sepakat mendirikan partai politik.

Salah satu prasyarat untuk mengusung pasangan calon secara umumnya adalah dengan menggunakan kendaraan partai politik. Partai politik kemudian mengajukan calonnya yang memiliki kapabiliti dalam kepemimpinan dan integritas. Partai politik, awalnya memiliki beberapa anggota organisasi atau kelompok-kelompok yang kemudian memiliki kepentingan politik yang sama sehingga bergabung dan membentuk partai politik.

Partai pendukung dari pasangan calon Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur adalah Golkar, PDIP, PDS dan PBB. Sangat jelas dari partai



Golkar mendukung sepenuhnya ke Ilham Arief Sirajuddin karena merupakan kadernya sendiri. Partai Damai Sejahtera (PDS) merapat dan mendukung ke IASmo mengingat dari para anggota dari PDS adalah masyarakat yang beragama nasrani. Seorang ketua Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Makassar yaitu Bapak Larisman Hutagaul yang sepakat dengan para pimpinan PDS, Nelson Kammisi dan Mathius Thimang untuk memberikan dukungannya ke IASmo.

Dukungan ke IASmo dengan alasan figur Ilham Arif Sirajuddin adalah pemimpin yang berdiri di atas semua golongan. Tanpa sekat agama, warna kulit, bahasa dan aneka perbedaan lainnya. Di mata para pemimpin partai PDS, selama empat tahun memimpin Makassar, tak terdengar peristiwa "benturan" antar agama. Dengan komposisi masyarakat majemuk, Makassar membutuhkan pemimpin yang dekat dengan semua golongan, seperti yang dikatakan oleh seorang tim pemenangan PDS yang peneliti wawancarai bapak Garry Tumbelaka di rumahnya.

Perlu diketahui bahwa warga Makassar beragama Nasrani sekitar 9,8 persen dari total 1.148.204 jiwa. Meski jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan angka pemeluk agama Islam (88 persen). Warga Nasrani dikenal solid, taat, dan patuh dengan anjuran pemuka agamanya. Suara PDS memang tak terlalu banyak, berdasarkan hasil Pemilu 2004 partai ini hanya meraih 19.816 suara (3,57 persen) dari 500 ribu lebih wajib pilih.

Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri juga mendukung pasangan IASmo. Legalitas dukungan secara sahnya datang dari ketua DPD PDIP Sulsel, Zainal Basri Palaguna . Menurut sumber yang penulis wawancarai yaitu Bapak Ardianto sebagai anggota dari PDIP di sekretariat PDIP Makassar di jalan Landak Baru, berikut petikan wawancaranya :

“ Kami (PDIP) solid untuk memenangkan IASmo di pemilihan walikota Makassar kemarin. Tidak ada keraguan pada komitmen dan kesetiaan kami. PDIP teruji atas komitmen dan kesetiaan itu. Kami punya pengalaman dan kesolidan kami memenangkan pasangan Sayang di Pilgub lalu. Kami ingin membawa semangat kemenangan Pilgub itu ke Makassar. Apalagi platform IASmo sama dengan platform PDIP yang memperjuangkan wong cilik”.

Lain halnya pula dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Yang diwakili oleh Herman Saidi dan Arif Muhammadiyah, yang sama-sama berasal dari partai yang berasakan Islam. Dari hasil wawancara dengan informan anggota partai tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kedua partai tersebut tidak ada kontrak politik secara hitam di atas putih. Dukungan mereka murni karena melihat figur kepemimpinan yang teruji dan berpengalaman. Bukti kepemimpinan selama 5 tahun yang sebelumnya dari Ilham Arif Sirajuddin telah terbukti Makassar menjadi ikon untuk wilayah Indonesia Timur.

Partai Golkar, PDIP, PDS, PBB dan PBR memberikan dukungan sepenuhnya ke pasangan IASmo jauh sebelum pasangan ini mendaftarkan

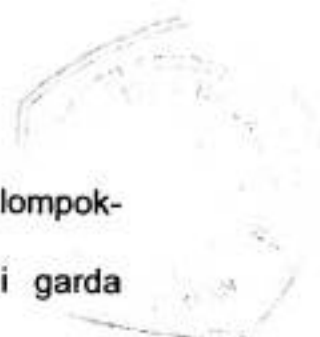
diri ke KPU kota Makassar. Sebagai prasyarat menjadi calon walikota, pasangan ini telah mendapatkan legalitas secara hukum, sehingga memudahkan pasangan ini lolos secara administratif.

Partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang berkompetisi untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Singkatnya tak ada negara moderen tanpa partai politik. Partai politik menurut Maurice Duverger bukanlah sebuah komunitas melainkan kumpulan dari beberapa komunitas. Sebagai kumpulan komunitas maka di dalam tubuh partai politik hadir berbagai kelompok kecil masyarakat yang menyebar ke beberapa pelosok wilayah geografis suatu negara dalam bentuk kaukus cabang partai atau asosiasi lokal pendukung partai.

Misalnya kelompok kepentingan seperti AMPG dan AMPI yang masih menjadi bagian dari partai Golkar. Dengan penuh keyakinan dan kepentingan bersama mereka mengawal agar pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur mendapatkan dukungan penuh dari semua kader dan simpatisan Golkar.

Peran dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut adalah bagaimana memberikan pelajaran politik kepada masyarakat dan khususnya



partai, supaya proses demokratisasi ini berjalan secara maksimal. Kelompok-kelompok kepentingan dalam peran-perannya ini harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan percepatan demokrasi di Indonesia. Ini sejalan dengan motto dari kelompok kepentingan dari partai Golkar yakni; solidaritas dan kerakyatan.

Kosgoro, AMPI dan AMPG merupakan bagian dari KINO (Kelompok Induk Organisasi) yang melahirkan Partai GOLKAR, maka secara otomatis pada pemilihan Walikota Makassar kemarin Kosgoro, AMPI dan AMPG mengusung pasangan Ilham Arif Sirajuddin & Supomo Guntur. Tindak lanjut dari keseriusan kelompok tersebut mengusung Bapak Ilham Arif Sirajuddin sebagai calon walikota ditandai dengan deklarasi pada acara pelantikan Pemuda KOSGORO se-Sulawesi Selatan di lapangan Hasanuddin pada bulan september 2008.

Berikut hasil wawancara dengan anggota Kosgoro Makassar, Bapak Asdar Tukan yang diwawancarai pada tanggal 2 Maret 2009 di kantor sekretariat Kosgoro, menyatakan bahwa :

\* Persiapan para organisasi dan kelompok-kelompok kepentingan yang masih menjadi bagian dari partai Golkar, adalah mengusung kembali salah satu kader terbaik yang kita miliki adalah Bapak Ilham Arief Sirajuddin sebagai calon walikota Makassar. Beliau dianggap masih layak memimpin kota Makassar selama 5 tahun kedepan. Kosgoro dalam hal ini tidak hanya mendukung lewat ucapan saja, tetapi Kosgoro juga mengambil garda terdepan dalam mengawal proses pesta demokrasi untuk pertama kalinya di Makassar, agar berjalan aman dan lancar. Setelah Kosgoro mendeklarasikan mendukung sepenuhnya kepada

lasMo, Kemudian dibentuklah tim-tim lapangan guna memantapkan konsolidasi di tiap kelurahan dan kecamatan."

Hasil wawancara menurut pemahaman peneliti bahwa Kosgoro, AMPI dan AMPG sebagai salah satu pendiri Partai GOLKAR tidak mempunyai bargaining politik tertentu pada pasangan walikota dan wakil walikota Makassar kemarin, karena salah satu kadernya (dalam hal ini Ilham Arief Sirajuddin) adalah calon walikota Makassar. Jadi mereka wajib mendukung penuh pasangan ini pada Pilkada walikota kemarin. Karena harapan sesungguhnya dari Kosgoro, AMPI dan AMPG dengan mengusung pasangan ini, adalah bagaimana kota Makassar supaya bisa lebih berkembang dan maju.

Awalnya kelompok kepentingan ini mengantar Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur secara arak-arakan mendaftar ke KPU menjadi kandidat Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh partai Golkar dan partai pendukung lainnya. Setelah mendapatkan nomor peserta yaitu no 1, mereka kemudian membentuk tim sukses dengan jaringan keluarga, sosial dan relawan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan dengan tugas dan fungsi mensosialisasikan pasangan IASmo.

Satu lagi kelompok relawan calon walikota Makassar terbentuk. Namanya Milisi, relawan ini terbentuk di luar struktur tim pemenangan Partai Golkar. Ketua dari Milisi ini adalah Juniar Arge yang siap memenangkan IASmo dalam pilkada . Kelompok relawan ini awalnya hanya ingin dibentuk di



wilayah utara Makassar, yakni Wajo, Ujung Tanah, Tallo dan Bontoala. Tetapi karena permintaan masyarakat di kecamatan lain, sehingga kelompok ini melebarkan sayap menjadi 14 kecamatan. Milisi dibentuk bukan hanya sekedar menjadi relawan, tetapi ingin merekrut orang-orang non-struktural atau kelompok masyarakat yang pikirannya masih ambivalen dalam pilkada Makassar.

Salah satu LSM Nasional yaitu Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) Kota, yang diketuai oleh Wardah Hafidz. Bedanya Non Government Organization (NGO) ini terlebih dulu melakukan kontrak politik dengan pasangan IASmo. Salah satu isi dari kontrak politik itu adalah komitmen Ilham untuk mencarikan solusi sengketa tanah serta bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Adapun juga materi dari kontrak politik ke IASmo adalah membangun ruma susun sederhana milik (rusunami) dengan hak milik bagi warga tidak mampu. Penandatanganan kontrak politik itu dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2008. KPRM mengklaim memiliki 65 ribu kader yang menyebar di 54 kelurahan, 12 kecamatan dan 1.300 RT. Keanggotaan KPRM dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

IASmo juga memiliki tim independen yang mendukungnya. Tim Independen ini dipimpin oleh Bahrianto yang memiliki tanggung jawab cukup besar untuk memenangkan Ilham dalam pilkada Makassar. Tim ini juga dulu tim pemenang Aziz Qahhar Mudzakar dan Mubyl Handaling pada pilgub



Sulsel. Tugas independen seperti mengkonsolidasi komponen-komponen di luar partai pengusung Ilham, seperti relawan, kelompok mahasiswa, etnis, agama, cendekiawan dan lainnya. Selain itu, tim ini juga bertugas mengatur skenario pemenangan untuk tingkat grassroot dan penggalangan dukungan terhadap Ilham di setiap kecamatan.

Berikut Wawancara dengan bapak Bahrianto yang diwawancarai pada tanggal 2 Maret 2009 di d'Green Cafe, menyatakan bahwa :

" Pengukuhan saya sebagai Koordinator Tim pada saat itu di Hotel Singgasana. Tim independen ini adalah tim Inti di IASmo, yang bertugas mengatur skenario pemenangan untuk tingkat grassroot dan penggalangan dukungan terhadap IASmo di 14 kecamatan yang ada di Makassar. Selain itu, Dalam upaya memenangkan pasangan ini, Tim ini juga membuat simpul-simpul pemenangan dari masyarakat. Setiap harinya para tim relawan melakukan rapat konsolidasi dan evaluasi akan kinerjanya masing-masing. Dari situlah mereka bisa mengukur seberapa besar dari pasangan IASmo bisa memenangkan Pilkada walikota Makassar."

Dukungan terhadap Ilham Arief Sirajuddin, juga mengalir dari para pemuda. Tim relawan yang mendeklarasikan namanya sebagai Pasukan Khas (Paskhas) dan Komunitas Pendukung Aco Sirajuddin (Kompas) Rappocini. Pengukuhan pasukan itu dilakukan langsung oleh Master Campaign IASmo yakni Syamsul Bahri. Semua pemuda yang ada di Kecamatan Rappocini menyatakan diri bersatu dan siap menangkan Ketua Partai Golkar Makassar tersebut. Sedikitnya seribu relawan yang mendukung

dan tersebar di tiap kelurahan seperti Bantabantaeng, Ballaparang dan Tidung.

Berbagai persiapan dilakukan tim Pemenangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo). Salah satunya, membuat fakta konkret berupa alasan mengapa IASmo mesti memimpin Makassar ke depan. Alasan-alasan tersebut kini mulai disusung dalam berbagai bentuk. Misalnya, brosur yang dicetak tak kurang dari 100 ribu lembar. Selain itu, juga dipersiapkan baliho, spanduk dan alat peraga lainnya.

Fakta-fakta tersebut diluncurkan untuk menyertai program IASmo bebas yang menjadi tema dari kampanye pasangan ini. Lewat fakta-fakta yang diuraikan, timnya ingin menunjukkan betapa Makassar telah berubah di tangan Ilham. Isinya adalah perubahan dan kemajuan yang sudah dilakukan selama ini. Jika perubahan itu ingin dilanjutkan, maka masyarakat harus memilih IASmo. Dengan membuat pencitraan dan jargon politik yaitu Teruji dan Berpengalaman kepada publik.

Adapun yang menjadi visi dari pasangan IASmo untuk Makassar periode 2009-2014, yaitu *bebas* dari lahir sampai mati. Yang dijabarkan dengan *bebas* biaya persalinan dan pengobatan, *bebas* biaya adm.kependudukan : Akta Kelahiran, KK dan KTP, *bebas* biaya pendidikan dan angkutan anak sekolah, *bebas* biaya bantuan hukum, *bebas* biaya angkutan jenazah dan penguburan.

Setelah kelompok-kelompok kepentingan memperkenalkan program partai yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan dari pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur menjadi kandidat Walikota dan wakil walikota periode 2009-2014. Selanjutnya, para kelompok-kelompok kepentingan ini menjaga dan mengawal isu black campaign yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya penemuan sekitar 1.200 selebaran yang menjelek-jelekkan pasangan IASmo dan pasangan kandidat lainnya. Selebaran ini hanya mengajak orang untuk golput pada pilkada walikota.

**B. Upaya Kelompok Kepentingan Dalam Mengusung Calon Perseorangan Pada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar.**

Beraneka ragam cara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna memenangkan pasangan calon. Dari tujuh pasangan calon, hanya PASMI yang merupakan kombinasi pria dan wanita. Kehadiran Kasma yang akademisi diharapkan dapat menarik simpati pemilih wanita. Selain mengandalkan pemilih perempuan, sejauh ini PASMI juga mendapatkan banyak dukungan dari organisasi masyarakat seperti buruh, rakyat miskin kota, LMD, Serenai, 16 FM (organisasi bentukan untuk warga pinggiran), tim pejuang, forum perempuan menggugat hingga kalangan gereja. Hanya hitungan hari, kelompok-kelompok kepentingan yang mengusung PaSmi, berhasil mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat

sebagai bentuk dukungannya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU).

Kandidat Walikota dan wakil walikota Makassar dari jalur independen Firmansyah Mappasawang-Kasma F Amin (PASmi) memanfaatkan masa kampanye dialogis dengan terus melakukan sosialisasi di tengah masyarakat Makassar. Pasangan bernomor urut 5 ini memanfaatkan jaringan keluarga untuk membantunya di pilkada Makassar. Pasmis lebih banyak melakukan kunjungan ke rumah keluarga masing-masing, karena memang target kita juga menjalankan mesin jaringan keluarga.

Kelompok Relawan yang bernama Jaringan Masyarakat Miskin Kota, yang anggotanya ada di setiap kelurahan di kota Makassar. Kelompok ini mensosialisasikan PASmi sebagai pasangan independen yang menggugah dan menjadikan pilihan kandidat yang utama. Mereka terus berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat agar menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Dengan alasan pada pemilihan Walikota Makassar 29 Oktober akan menentukan arah kebijakan Kota Makassar terdapan.

Berikut wawancara dengan Tim Kampanye PASmi Sultan Wahid, yang berhasil peneliti wawancarai pada tanggal 19 Februari 2009 di rumahnya menyatakan:

" Saat melakukan kampanye tertutup, PASmi selalu membagi-bagikan kartu prioritas PASmi yang didalamnya ada foto PASmi serta nomor urut pasangan tersebut. Kelak, ketika PASmi terpilih sebagai walikota Makassar, maka masyarakat cukup memperhatikan kartu prioritas ini, maka akan bisa bertemu dan melaporkan apa keluhan masyarakat."

Hasil wawancara itu, peneliti menyimpulkan bahwa, Tim PASmi selalu melakukan pendekatan rumah ke rumah (door to door) agar supaya hubungan emosional antara konstituen dengan PASmi bisa lebih terjalin dengan baik. Tidak mengherankan jika cara interaksi ini bisa membuat pasangan PASmi berada pada nomor urut 3 pada pilkada walikota Makassar kemarin.

Persiapan lain dari tim relawannya adalah mempersuasi para pemilih perempuan. Dengan mengatakan bahwa dari tujuh pasangan calon, hanya PASmi yang merupakan kombinasi pria dan wanita. Kehadiran ibu Kasma sebagai akademisi diharapkan dapat menarik simpati pemilih perempuan. Alasannya, hanya perempuan yang bisa memahami masalah para perempuan-perempuan yang ada di kota Makassar. Baik masalah domestik hingga masalah publik.

Selanjutnya hasil wawancara dari informan dalam hal ini bapak Rahmat Wijaya selaku Ketua Tim Relawan Pemilih Hati Nurani Makassar (PHNM) pemenang PASmi yang diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2009 mengenai persiapan kemenangan kandidat PASmi pada pemilihan Walikota Makassar 2008, menyatakan bahwa :



" Pada saat itu saya sebagai ketua Tim Relawan pemilih hati nurani Makassar, selalu mengkonsolidasikan dengan koordinasi tim pemenangan di setiap kecamatan untuk memastikan kinerjanya. Tim ini mensosialisasikan PASmi kepada kelompok masyarakat marjinal, masyarakat perempuan dan berbagai lembaga sosial. Kelompok ini terkadang terlupakan oleh para kandidat lainnya, sehingga kami bisa mengklaim kalau mereka mendapatkan pengetahuan akan pasangan calon walikota makassar dari timnya."

Hasil wawancara di atas menurut peneliti bahwa para relawan berhasil mensosialisasikan pasangan PASmi lewat kampanye dialogis dan iklan, seperti baliho, stiker dan spanduk. Dengan adanya pengenalan simbol-simbol dan pengetahuan yang lebih mendalam akan latar belakang pasangan calon, membuat masyarakat bisa menjadi simpati. Dengan cara kerja seperti ini, relawan juga telah memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat.

Relawan PASmi kebanyakan dari kaum perempuan, hal ini bisa dilihat dari adanya kelompok perempuan pengajian. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Saidah Aras, bahwa dia mendukung sepenuhnya pasangan PASmi karena pasangan ini dianggap benar-benar akan memperhatikan nasib perempuan yang ada di Kota Makassar. Contoh konkret itu ditunjukkan karena hanya Firmansyah yang memilih perempuan (Kasma F Amin) sebagai wakilnya. Bukti mendukungnya kelompok ini adalah dengan adanya dukungan KTP yang jumlahnya 6.816 orang. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah menjelang pemilihan katanya.

Banyak dukungan dari kaum perempuan menjadi salah satu sumber keyakinan PASmi untuk menang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan



oleh Tim Pemenangan PASmi yaitu Wahidah Burhanuddin. Menurut Wahidah jika perempuan ingin merubah nasib mereka maka harus bersatu memilih Pasmu maka hal tersebut akan terwujud beberapa saat setelah Firmansyah dan Kasma dilantik. Perempuan yang menggunakan jilbab ini juga menambahkan bahwa sudah saatnya perempuan ikut berkarya dalam segala hal.

Dalam memantapkan langkah-langkah yang ditempuh oleh PASMI para kelompok-kelompok kepentingan berupaya mengembangkan pengenalan orientasi politik dari PASmi apabila terpilih menjadi walikota dan wakil walikota Makassar. Dengan nama program utama yang berdimensi lima yaitu:

Pertama, dimensi sosial agama dan budaya yang konkritnya memberikan pendidikan bersubsidi (gratis) sesuai prestasi belajar yang ditunjukkan. Setiap warga masyarakat kota Makassar yang multi ras dan multi agama telah memberikan suatu wahana untuk mewujudkan pengembangan budaya masyarakat yang berorientasi kepada pengembangan kualitas pendidikan. Adanya pendidikan bersubsidi diberikan kepada setiap masyarakat yang memiliki prestasi belajar yang mapan dan membantu kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga diperlukan adanya bantuan yang bersifat meringankan beban melalui paket-paket pelajaran yang diberikan baik berupa optimalisasi

pembelajaran paket A, paket B dan paket C dalam rangka memenuhi harkat dan martabat masyarakat yang berkualitas yaitu setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pembelajaran dan sistem pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimensi ini menjadi program prioritas kepada warga kota Makassar sebagai percontohan untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus dan pendidikan nasional secara umum.

Kedua, dimensi ekonomi yang konkritnya berupaya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang sinkron dengan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Adanya potensi ekonomi yang dimiliki oleh kota Makassar baik berupa potensi jumlah penduduk, potensi wilayah, potensi usaha masyarakat, potensi partisipasi dan potensi pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, semua potensi ini diharapkan menjadi potensi yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi Makassar dan menambah akses Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada prinsipnya menjadi penyumbang yang potensial bagi APBD dan APBN. Selain itu, potensi sumber daya manusia baik sebagai penduduk maupun sebagai pekerja diharapkan mampu mengakses semua potensi usaha yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperbaiki tingkat inflasi yang sesuai dengan akses regulasi kebijakan ekonomi yang produktif. Dimensi ini menjadi suatu program utama yang dicanangkan agar nantinya

setiap masyarakat kota Makassar mampu maju dan berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya meningkat seiring dengan berkurangnya atau terjadinya minimalisasi pengangguran di semua sektor aspek kehidupan masyarakat kota Makassar.

Ketiga, dimensi lingkungan yaitu mewujudkan Makassar Hijau sebagai program utama yang perlu diterapkan dalam rangka mengantisipasi adanya pemanasan global, pencemaran polusi udara, pencemaran air dan pencemaran sampah pada berbagai lingkungan yang ada di kota Makassar, sehingga ini menjadi program utama Calon Walikota Makassar yang peduli dengan lingkungan kota Makassar, sehingga diharapkan nantinya Makassar menjadi kota yang indah, rindang dan memiliki tata ruang kota yang asri dan memiliki akses untuk menjaga terjadinya pemanasan global dan mengendalikan terjadinya bencana atau musibah akibat kerusakan lingkungan hidup yang terabaikan. Program ini mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal dengan Green Environment dengan memperkenalkan kepada setiap warga masyarakat kota Makassar untuk menanam satu pohon satu orang di lingkungannya.

Dimensi keempat, kebijakan internal untuk terus mengembangkan bentuk konkrit peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. Pemerintah Kota Makassar diupayakan untuk menjadi pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki prospektif di dalam menata birokrasi

pemerintahan yang bersih, peduli, handal, mandiri dan memiliki profesionalisme dalam bidang kerja yang diemban. Pada akhirnya setiap warga negara mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di dalam menerima bentuk-bentuk layanan yang diberikan baik berupa pelayanan prima maupun pelayanan dimensi terpadu.

Bentuk penerapan pelayanan prima yang dikembangkan oleh pemerintahan yang baik adalah memberikan pelayanan yang sederhana kepada publik, memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada publik, melayani masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi, mengembangkan pelayanan yang ekonomis, efisien dan efektif, sesuai dengan dimensi pelayanan yang transparan dalam bukti fisik, kemampupahaman, daya tanggap, kehandalan dan memiliki akses jaminan, sehingga nantinya Pemerintah Kota Makassar menjadi pemerintahan yang teladan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dan kelima, dimensi kebijakan eksternal yaitu terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga swadaya dan elemen masyarakat. Disadari bahwa untuk melakukan pembangunan kota Makassar yang terencana, terarah dan berkesinambungan, maka setiap unsur yang ada dalam masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Keikutsertaan menjadi suatu pressure atau tekanan yang mampu mengangkat harkat dan martabat kota Makassar dengan terus memberikan aspek strategis dalam

keterlibatannya untuk mengembangkan kota Makassar yang lebih maju, lebih modern dan lebih terpadu sesuai dengan akses sistem, konsisten, dan kompleks dalam mewujudkan kota Makassar menjadi impian Kota Idaman.

Uraian-uraian di atas merupakan suatu uraian mengenai orientasi yang diemban oleh kandidat Walikota Makassar yang independen untuk maju bersama dengan masyarakat yang mempercayai PASmi sebagai calon kandidat yang memiliki prospektif dan kemandirian untuk terpilih menjadi calon walikota. Dengan program tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan pimpinan baru, bebas dan bermasyarakat maka sangat diperlukan adanya yang independen tanpa adanya kepentingan partai yang ikut dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Dari pasangan calon walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur (IASmo) awal mulanya mendapat dukungan dari partai Golkar, PDIP, PDS, PBB dan PBR. Partai pendukung ini mendukung sepenuhnya ke IASmo jauh sebelum pendaftaran ke KPU Kota Makassar. Partai pendukung ini menganggap bahwa pasangan IASmo telah teruji dan berpengalaman dalam memimpin Makassar ke depan. Kelompok-kelompok kepentingan yang mengusung dan mendukung beberapa diantaranya masih menjadi bagian dari partai pendukung pasangan calon. Yaitu AMPI, AMPG dan Kosgoro yang masih bagian dari Partai Golkar, sebagaimana diketahui pula bahwa pasangan IASmo memang didukung oleh partai Golkar. Salah satu lembaga swadaya masyarakat nasional yaitu Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) Kota juga mendukung pasangan ini. Adapun kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang menjadi tim relawan dan tim sukses bersama-sama mengawal pasangan IASmo mulai dari pendaftaran di KPU sampai mengkonsolidasikan para tim untuk mensosialisasikan pasangan IASmo ke masyarakat. Satu



persatu kelompok relawan bermunculan mendukung pasangan calon, karena mereka merasa apa yang menjadi visi dan misi dari pasangan IASmo sesuai dengan kepentingan masyarakat Makassar. Apalagi menurut mereka bahwa telah terbukti kinerja selama kepemimpinan 5 tahun dari Ilham Arief Sirajuddin, Makassar telah menjadi ikon kota besar di wilayah Indonesia Timur. Dengan jargon teruji dan berpengalaman, kelompok kepentingan merasa pasangan IASmo layak untuk memimpin Makassar periode 2009-2014.

2. Upaya yang dilakukan oleh para kelompok kepentingan dalam mengusung pasangan independen Firmansyah Mappasawang-Kasma F Amin (PASmi) sangat beragam. Mulai dari mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat sampai mensosialisasikannya. Kesiapan tim relawan ini dengan melibatkan adanya unsur tim keluarga, partisipan dari lembaga organisasi massa, LSM, dan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan. Kelompok Relawan yang bernama Jaringan Masyarakat Miskin Kota, yang anggotanya ada di setiap kelurahan di kota Makassar. Kelompok ini mensosialisasikan PASmi sebagai pasangan independen yang menggugah dan menjadikan pilihan kandidat yang utama. Mereka terus berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat agar menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Tim PASmi juga selalu melakukan pendekatan rumah ke rumah (door to door) agar supaya

hubungan emosional antara konstituen dengan PASmi bisa lebih terjalin dengan baik. Tidak mengherankan jika cara interaksi ini bisa membuat perolehan suara pasangan PASmi berada pada posisi teratas dari calon perseorangan pada Pilkada Walikota Makassar kemarin.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan tinjauan penelitian dengan inisiatif untuk memajukan pelaksanaan Pilkada Walikota Makassar berikutnya maka peneliti mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :

Agar kiranya calon perseorangan atau independen tetap bisa diberi ruang untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada Walikota Makassar selanjutnya. KPU Kota Makassar sebagai lembaga pelaksana dari perhelatan demokrasi 5 tahun sekali ini bisa menjaga semua proses Pilkada ini berjalan aman lancar dan harus netral tanpa membedakan pasangan calon dari parpol dengan pasangan calon perseorangan (independen). Ada baiknya juga data-data hasil Pemilihan Langsung Walikota Makassar tahun 2008 kemarin bisa dimasukkan ke internet, agar masyarakat luas bisa mengakses lebih mudah dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rizali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pilkada secara langsung*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2005.
- Arfani, Riza Noer. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1996.
- Budiarjo, Meriam. Prof. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar Malang 2006.
- Gaffar, Affan. *Perilaku Pemilih di Indonesia*, Yogyakarta: Study Kasus Yogyakarta Gadjah Mada University 1992.
- Hamersma, Harry. *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, Jakarta: PT. Gramedia 1983.
- Huda Ni'matul, SH. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Huntington P.S dan Nelson. L. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Kanta Prawira. R. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1988.
- Macridis.C.R, Bernard.E.B. *Perbandingan Politik*, Jakarta: Erlangga. 1996.
- Mas'ocd Mohtar.Dr.Macandrew.C.Dr. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.

Nadir, Ahmad, *PILKADA Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2005, *Pilkada secara Langsung*. Tira Media, Surabaya 2005.

Philipus, Ng dan Aini, Nurul, *Sosiologi dan Politik*, PT. Raja Grafindo Persada 2004.

Rush, Michael dan Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.

Saleh, Karim Prof, *Otonomi Daerah*. Makassar: Hasanuddin University Press 2003.

Sanit Arbi, Drs. *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC Surabaya 2002.

Varma.P.S. *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.

Sumber lain :

<http://unsoed.ac.id/cmsfak/UserFiles/File/PSKp/DINAMIKA%20KELOMPOK.doc>

<http://makassarkota.go.id>

[www.tribun-timur.com](http://www.tribun-timur.com)

[www.fajar.co.id](http://www.fajar.co.id)